



**BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-Desa)
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**

Pada Hari Senin Tanggal 04 Juli 2013 bertempat di Balai Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio telah disusun dan diselesaikan Dokumen RPJM-Desa Desa Kedungbanjar 2013 s/d 2018 sebagai acuan Pembangunan Desa Kedungbanjar selama 5 (lima) tahun kedepan. Dalam proses penyusunan dokumen tersebut betul-betul dilaksanakan secara partisipatif hasil aspirasi masyarakat Desa Kedungbanjar dan melibatkan semua komponen masyarakat Kedungbanjar.

Adapun Tahapan Penyusunan Dokumen tersebut adalah :

1. Sosialisasi Program RPJM-Desa dan pembentukan tim penyusun RPJM-Desa Desa Kedungbanjar.
2. Pembekalan SDM TIM RPJM-Desa Kedungbanjar
3. Pemahaman potret Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.
4. Melakukan Proses Tabulasi Hasil Pembahasan Potret Desa, Kalender Musim dan bagan Kelembagaan untuk mengetahui Bobot serta prosentase Usulan Warga yang telah berpartisipasi dalam Forum Musrenbangdesa.
5. Melakukan Analisa Hasil pembahasan potret Desa, Kalender Musim dan bagan Kelembagaan untuk dikelompokkan berdasarkan masalah dan menentukan peringkat masalah.
6. Penyusunan Draf Awal Dokumen RPJM-Desa .
7. Penyusunan Draf Akhir RPJM-Desa.
8. Penyerahan Dokumen RPJM-Desa ke Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan kabupaten Lamongan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungbanjar, 04 Juli 2013

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Kedungbanjar



SUJITO, S.Pd

Kepala Desa Kedungbanjar



GUNARTO, SE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan memberi rahmad dan hidayahNya sehingga kami Tim Penyusun dapat menyelesaikan proses Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kedungbanjar tahun 2013– 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kedungbanjar ini merupakan arah kebijakan pembangunan desa tiap tahunnya.

Pada kesempatan ini kami Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

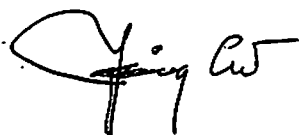
1. Bapak Kepala Desa Kedungbanjar
2. Seluruh Masyarakat Desa Kedungbanjar
3. Seluruh Lembaga Desa (BPD, LMP) dan juga Tokoh Agama, Pemuda, Organisasi Perempuan, tokoh Masyarakat, dan Lain-lain yang tidak bisa kami sebut.

Dan semua narasumber yang telah banyak membantu Tim dalam penggalan data serta penulisan dokumen RPJM-Desa ini. Kami menyadari bahwa dalam dokumen ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan kami, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dokumen RPJM-Desa tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya Tim Penyusun berharap mudah-mudahan dokumen ini bisa berguna bagi kita semua masyarakat desa Kedungbanjar dan apa yang menjadi rencana pembangunan dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Kedungbanjar, 04 Juli 2013

Tim Penyusun Dokumen RPJM-Desa
Desa Kedungbanjar



SUWANDOYO
Ketua TIM



KASDAN, S.Pd
Sekretaris TIM

PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Berita Acara Pengesahan Dokumen RPJM-Desa	I
Kata Pengantar RPJM-Desa.....	II
Daftar Isi	III
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Pengertian	6
1.4.1. Pengertian RPJM-Desa.....	6
1.4.2. Sasaran Penyusunan RPJMDes	7
1.4.3. Kedudukan RPJM-Desa.....	8
1.4.4. Hubungan RPJM-Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.5. Sistematika Penyusunan dan Penulisan RPJMDes	9
1.5.1. Sistimatika Penyusunan	9
1.5.2. Sistimatika Penulisan	12
 BAB II : PROFILE DESA	
2.1. Kondisi Desa.....	14
2.1.1. Sejarah Desa	14
2.1.2. Demografi Desa	14
2.1.2.1. Kondisi Geografis Desa.....	14
2.1.2.2. Kependudukan	16
2.1.2.3. Pendidikan	18
2.1.2.4. Kesehatan Masyarakat.....	19
2.1.3. Keadaan Sosial.....	21
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	24
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.....	26
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa	26
2.2.2. Struktur Organisasi Pemberintah Desa.....	27
2.2.3. Pembangunan Desa.....	30

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi	34
3.1.1. Sumber Daya Alam.....	34
3.1.2. Ekonomi.....	34
3.1.3. Pendidikan	35
3.1.4. Kesehatan Lingkungan	35
3.1.5. Politik Sosial dan Budaya.....	35
3.1.6. Kelembagaan / Organisasi	35
3.2. Masalah.....	36
3.2.1. Sumber Daya Alam.....	36
3.2.2. Sumber Daya Manusia.....	36
3.2.3. Ekonomi.....	37
3.2.4. Pendidikan	37
3.2.5. Kesehatan Lingkungan	37
3.2.6. Politik Sosial dan Budaya.....	37
3.2.7. Kelembagaan / Organisasi	38

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA..... 39

4.1. Visi dan Misi Desa.....	39
4.1.1. Visi Desa Kedungbanjar	39
4.1.2. Misi Desa Kedungbanjar	39
4.1.3. Keterkaitan Misi Desa Kedungbanjar dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan.....	40
4.2. Kebijakan Pembangunan	41
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	41
4.2.1.1. Analisa Hambatan dan Kekuatan Desa Kedungbanjar.....	42
4.2.1.2. Analisa Penentuan Tingkat Masalah.....	48
4.2.1.3. Analisa Pengkajian Tindakan Masalah.....	49
4.2.1.4. Analisa Penentuan Peringkat Masalah.....	51
4.2.2. Potensi dan Masalah	53
4.2.3. Program Pembangunan Desa	62
4.2.4. Strategi Pencapaian.....	68
4.2.5. Strategi Pengelolaan Keuangan Desa	69

4.2.5.1. Asas Umum.....	69
4.2.5.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	69
4.2.5.3. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	72
4.2.5.4. Pembiayaan.....	75
4.2.5.5. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa	75
4.2.5.6. Permasalahan	78

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran-saran.....	81
5.3. Penutup	82

Lampiran :

1. Peta Desa
2. Tabel Pengelompokan Masalah dan Potensi Desa
3. Tabel Daftar Masalah dan Potensi Dari Potret Desa Kedungbanjar
4. Tabel Gambar Kalender Kalender Musim
5. Tabel Daftar Masalah dan Potensi Dari Kalender Musim
6. Diagram Venn
7. Tabel Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
8. Tabel Daftar Analisa Penentuan Masalah
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) TH 2013- 2018
10. Dokumen Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa
 - a. Daftar Hadir dan Berita Acara Sosialisasi Pembuatan Dokumen RPJM-Desa
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Perumus Dokumen RPJM-Desa
 - c. Daftar Hadir dan Berita Acara Pembahasan Draf Awal
 - d. Daftar Hadir dan Berita Acara Pembahasan Draf akhir
11. Berita Acara Rapat BPD tentang Persetujuan Perdes RPJM-Desa
12. Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Perdes RPJM-Desa
13. Peraturan Desa Kedungbanjar tentang Dokumen RPJM-Desa tahun 2013- 2018

PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya tersedia di daerah, dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah suatu daerah.

Konsep otonomi yang disebutkan dalam undang-undang 22 tahun 1999 pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Masyarakat Desa Kedungbanjar sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan home industri yang sangat tergantung dengan kondisi makro ekonomi secara global dan juga kebijakan pemerintah tentang regulasi sektor pertanian, harapan warga Desa Kedungbanjar khususnya petani mengharapkan adanya kebijakan yang seimbang yang dibuat pemerintah terkait mahalnnya biaya produksi pertanian yang tidak sebanding dengan harga dari pertanian itu sendiri yang menyebabkan makin terpuruknya perekonomian atau pendapatan perkapita warga petani. Disamping itu, persoalan irigasi menjadi permasalahan serius. Masyarakat Desa Kedungbanjar yang notabannya mengandalkan air dalam pengelolaan pertanian sering kekurangan ketersediaan air, apa lagi pada musim kemarau.. Akibatnya, persediaan air pun terbatas hanya pada saat penghujan saja.

Berdasarkan harapan serta kebutuhan warga Desa Kedungbanjar yang tergambar pada analisa masalah maka pemerintah Desa Kedungbanjar berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan-perubahan serta membuat kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil khususnya petani dengan

cara melakukan penyusunan perencanaan pembangunan strategi Desa Kedungbanjar yang partisipatif. Diwujudkan dalam sebuah dokumen RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dengan harapan agar pembangunan di Desa Kedungbanjar terencana dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi makro kebutuhan warga Desa Kedungbanjar.

Berkaitan dengan hal tersebut serta temuan-temuan di lapangan maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar yang Secara mendasar, maksud dan tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, rukun, damai serta untuk menumbuhkan proaktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat merasa ikut memiliki dan mengawasi, menjaga serta melestarikan jalannya proses pembangunan sehingga nilai manfaat pembangunan tersebut betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Keberadaaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat di gunakan sebagai gambaran dan acuan kongkrit tentang program-program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa lima tahun mendatang. Selain itu juga dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan adanya RPJM-Desa, maka di harapkan proses pembangunan akan tepat sasaran dan berkesinambungan. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan Desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis yang dimaksudkan berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM-Desa), merupakan dokumen yang dapat pula digunakan sebagai alat dan sasaran kontrol bagi pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Desa Kedungbanjar dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini untuk mengetahui program pembangunan Desa serta mengevaluasi kinerja pemerintah Desa.

Dengan demikian maka fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintahan tumbuh dengan baik dan apabila ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukann oleh pemerintah Desa cepat diketahui dan diselesaikan dengan musyawarah yang arif dan bijaksana.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbanjar sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 5 tahunan yang ditetapkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2013 – 2018 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kedungbanjar diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Desa Kedungbanjar sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 5 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

a. Maksud Penyusunan RPJM-Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Desa dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan di lakukannya UU Otonomi Daerah diharapkan dalam melakukan proses pembangunan di Desa bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang di miliki Desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM-Desa

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran

setrategis secara terarah dan efisien yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama lima tahun kedepan, sesuai dengan kaidah penyusunan Rencana (Spesifik, Terukur, Dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya serta dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan di biayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai kebijakan suatu desa untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia di desa.
5. Sebagai tolak ukur kinerja sejauh mana keberhasilan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama, serta menjadi refleksi pembangunan yang akan datang.
6. Tersedianya dokumen usulan program-program pembangunan desa baik fisik maupun non fisik yang saling terpadu dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
7. Sebagai masukan bagi Pemerintah daerah dalam penyusunan program Kabupaten Lamongan khususnya, dan pihak-pihak lain berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa.

1.3 DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) landasan hukum yang dipakai adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil Desa/Kelurahan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
 8. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 31 Maret 2010 Nomor: 414.2/1408/PMD.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan .
 10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 04 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 13. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2006 tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010.
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 16. Surat Keputusan Kepala Desa Kedungbanjar Nomor : 188/02/KEP/413/313.12/2013 tentang Tim Penyusun Dokumen RPJM-Des.

1.4 PENGERTIAN

1.4.1. PENGERTIAN RPJM Desa

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitam secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiliki sehingga mampu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.
3. Perangkat kelembabagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas

dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1181/M.PPN/02/2006 tengah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus perihal "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2006".

Adapun untuk penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
2. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
3. Peserta Forum Musrenbang desa terdiri atas : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) atau Lembaga sejenis, RW/RT, Kepala Dusun, Kepala Kampung, Organisasi Perempuan Desa, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh agama, dan Ormas yang ada di Desa yang nantinya ditunjuk sebagai TIM Penyusun dan warga masyarakat.

1.4.2 SASARAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada gagasan-gagasan masyarakat dan dirumuskan melalui Musyawarah Desa. Sehingga secara garis besar, yang menjadi sasaran dalam penyusunan dokumen RPJM Desa adalah :

1. Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala Desa Kedungbanjar yang mempunyai kebijakan penuh di Desa. Dengan menjabarkan Visi dan Misi Kepala Desa yang diselaraskan dengan Kebutuhan masyarakat Desa.

2. Perangkat Desa Kedungbanjar, dari Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, sehingga dalam menjalankan kegiatan Pemerintahan selaras dengan kebijakan Desa.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku pelaksana pembangunan di Desa, sehingga dapat bekerja dengan selaras sebagaimana tugas dan fungsinya.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala Desa, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.
5. Elemen Masyarakat Desa Kedungbanjar, dapat mengidentifikasi masalah yang menjadi kebutuhannya, sehingga di peroleh dokumen peraturan desa yang partisipatif.

1.4.3 KEDUDUKAN RPJM Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar disusun sebagai pedoman landasan dan referensi dalam menyusun rencana strategis (Renstra) yang setiap tahun akan di tuangkan dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes), yang di rumuskan melalui Musdes antara Pemerintah Desa dengan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap proses pembangunan di Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar memiliki kedudukan yang strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Bagi pemerintah Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat digunakan sebagai acuan melaksanakan kegiatan serta kebijakan pembangunan Desa, sedang bagi masyarakat, RPJM-Desa berfungsi sebagai tolak ukur bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kedungbanjar.

1.4.4 HUBUNGAN RPJM-Desa DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sebagai suatu Dokumen Kebijakan strategis di Desa, sudah tentu RPJM Desa adalah sebagai acuan setiap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Kedungbanjar yang mempunyai keterkaitan dengan Kebijakan-kebijakan

yang dihasilkan oleh Desa Kedungbanjar. Adapun hubungan RPJM-Desa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJM-Desa dibuat sebagai landasan untuk menyusun Renstra Desa setiap tahun.
2. Dokumen RPJM-Desa di susun harus merujuk pada RPJP Desa.
3. Dokumen RPJM-Desa harus menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan agar pembangunan di Kabupaten bisa berjalan serasi antara Desa dan Kabupaten.
4. Sebagai bahan usulan program Desa yang akan dijalankan melalui proses Musrenbangdes untuk menyusun APBD Kabupaten di setiap tahun anggaran.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENULISAN RPJM Desa

1.5.1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh komponen desa yang terdiri dari Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Organisasi Perempuan, Guru, Organisasi Kepemudaan, Kelompok Tani serta Warga biasa yang diawali dengan sosialisasi terkait Penyusunan Dokumen RPJM desa dan pembentukan TIM Penyusun yang diambil dari beberapa elemen-elemen Masyarakat Desa, dengan proses penggalan gagasan agar bisa memberikan usulan tentang permasalahan yang di gali dari pemetaan Potret Desa, Kalender Musim dan Bagan kelembagaan.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar dilaksanakan selama 1 (dua) bulan tepatnya bulan Juni 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar harus dilakukan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, meski demikian setiap tahun akan diadakan evaluasi oleh pemerintah Desa dengan seluruh warga, apabila di pandang perlu dan mendesak untuk diadakan revisi, maka RPJM-Desa tersebut akan di revisi berdasarkan informasi dan data lapangan dengan perhitungan yang cermat dan matang.

Didalam memfasilitasi penyusunan dan pembuatan RPJM Desa Kedungbanjar didasarkan pada beberapa hal yaitu:

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. Terbuka, yaitu suatu proses tahapan perencanaan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- e. Akuntabel, yaitu suatu proses dan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat, yaitu suatu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, dan
- k. Penggalian Gagasan, yaitu didalam menemukan masalah dan potensi suatu desa dilakukan penggalian data dan gagasan melalui alat kajian keadaan suatu desa dengan sumber informasi utama dari peserta muswarah perencanaan.

Adapun tahapan proses yang dilakukan dalam penyusunan RPJM Desa Kedungbanjar adalah :

1. Pembentukan TIM Penyusun

Di dalam Penyusunan RPJM Desa, pemerintah Desa mengadakan pembahasan/sosialisasi pada musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh

elemen masyarakat Desa serta membentuk Tim Penyusun yang dipilih oleh masyarakat dalam forum musyawarah dengan komposisi anggota dari perwakilan masing-masing kelompok. Yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Penyusun akan mendapatkan pengesahan berupa Surat Keputusan Pemerintah Desa sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Penjelasan Peran dan Tugas TIM Penyusun

Sebelum menjalankan tugasnya, Tim Penyusun yang sudah disahkan perlu diberi pemahaman akan peran dan tugasnya agar dapat memahami dan mengerti arah pembangunan desa kedepan serta bagaimana menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan baik dan Benar sehingga diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan Rencana Pembangunan Desa yang nantinya akan diimplementasikan di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Tim Penyusun harus bisa membuat kerangka kerja yang baik mengingat tugas yang diembannya sangat berat dan menuntut untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu serta dapat memuaskan semua pihak terutama dalam hal penyusunan prioritas gagasan/usulan. Diharapkan dengan adanya pemahaman peran dan tugas tim penyusun dapat menjalankan tanggungjawabnya lebih optimal.

3. Penggalian Gagasan dan Permasalahan

Untuk mendapatkan data permasalahan dan penyebabnya di masyarakat desa, maka pada tahapan ini Tim Penyusun perlu mengadakan pertemuan ditingkat kelompok/dusun guna menggali permasalahan desa dimana pada masing-masing kelompok/dusun mempunyai permasalahan yang berbeda. Dengan mengetahui permasalahan dan penyebabnya maka akan muncul suatu gagasan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan alat bantu perumusan masalah yang berupa Peta sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa, Diagram venn, didapat permasalahan yang ada sekaligus potensi yang dimiliki desa dalam mendukung penyelesaian masalah tersebut.

4. Musyawarah Penentuan Prioritas Program

Pada proses ini data yang diperoleh dari masing-masing kelompok/dusun disusun sesuai dengan bidangnya kemudian dilihat tingkat kemendesakkannya, tingkat kesulitan, potensi yang mendukung dan jangka

waktu penanganannya, tahap berikutnya dilakukan perangkingan untuk menentukan prioritas program ditingkat desa.

Dengan adanya hasil penentuan prioritas ditingkat desa, serta membagi sesuai bidang strategisnya, maka data yang ada sudah bisa digunakan untuk menyusun Rencana pembangunan Desa serta mencari sumber pendanaannya dan jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan factor kemendesakan untuk dikerjakan.

1.5.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika Penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 31 Maret 2010 Nomor: 414.2/1408/PMD adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang Penyusunan RPJM-Desa, Maksud dan Tujuan, Dasar hukum, Pengertian RPJM Desa serta hubungan RPJM-Desa dengan dokumen perencanaan lainnya dan Sistematika Penyusunan dan Penulisan.

BAB II. PROFIL DESA

Berisi tentang Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial dan Keadaan Ekonomi desa yang tergambar dari Demografi dan Pembangunan Desa dan Analisa dari kondisi yang tergambar pada Bab II.

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

Berisi tentang daftar potensi dan masalah yang diambil dari gambaran Potret Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan suatu desa. Visi dan Misi Desa serta keterkaitan Misi dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan.

BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Berisi tentang Visi dan Misi Desa serta keterkaitan Misi dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Kebijakan Pembangunan Desa Berisi tentang tabel rencana pembangunan jangka menengah Desa lima tahunan, tabel pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan dan tabel indikasi program pembangunan desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang diambil dari analisa lingkungan kebijakan strategis yang meliputi analisa pengelompokan masalah, analisa penentuan peringkat masalah, analisa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan analisa penentuan peringkat masalah.

Potensi dan Masalah, Program Pembangunan Desa dan Strategis Pencapaian yang Berisi tentang prioritas dan kebijakan pembangunan desa yang meliputi permasalahan strategi desa, prioritas dan kebijakan pembangunan Desa dan factor kunci keberhasilan pembangunan Desa.

Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan desa yang berisi tentang asas umum, arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah kebijakan pengelolaan keuangan desa dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB V. PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari berbagai rangkaian penyusunan draft sebuah dokumen, serta saran dan penutup.

LAMPIRAN :

Berisi tentang Peta Sosial Desa, Tabel data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecahan Masalah yang meliputi Prioritas Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Penanggungjawab. Tabel Rencana Pembangunan Desa.

PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

BAB II
PROFILE DESA

BAB II

PROFILE DESA.

2.1 KONDISI DESA

2.1.1 SEJARAH DESA KEDUNGBANJAR

Sejarah terbentuknya desa Kedungbanjar menurut para sejarawan Desa, bahwasanya dahulu kala ada seorang yang bernama Mbh Njar yang setiap hari dia berusaha untuk mencari sumber air. Setiap hari dia menggali tanah untuk mencari sumber air. Dan suatu saat dengan setiap hari dia menggali tanah maka semakin dalam tanah galiannya dan sampai menjadi sebuah kedung dan muncullah sumber air di kedung itu. Oleh warga sekitar karena yang membuat kedung itu Mbh Njar maka digabungkan kedua nama tersebut antara kedung dan njar, maka disebutlah tempat atau desa tersebut dengan nama Desa Kedungbanjar.

Itulah asal muasal nama Desa Kedungbanjar.

Sedangkan orang-orang yang pernah menjadi kepala Desa Kedungbanjar adalah:

Tahun 1929 – 1972	Bapak Ma'un
Tahun 1972 – 1999	Bapak Kusnan
Tahun 1999 – 2007	Bapak Subiono
Tahun 2007 – 2013	Bapak Sutaji
Tahun 2013 – Sekarang	Bapak Gunarto

Demikian ulasan singkat tentang sejarah desa Kedungbanjar dan orang-orang yang pernah menjabat menjadi kepala desa Kedungbanjar sejak tahun 1929 sampai dengan sekarang.

2.1.2 DEMOGRAFI DESA KEDUNGBANJAR

2.1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DESA

Secara geografis Desa Kedungbanjar terletak pada Topografi dan bentang lahan yang berupa Dataran seluas 290 Ha, dengan tinggi tempat yaitu sekitar 4 m di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Kedungbanjar terletak di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan luas desa 290 Ha, posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bakalrejo Kecamatan Sugio

- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomlangean Kecamatan Kedungpring.
- Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Sugio.
- Di sisi timur berbatasan dengan Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio.

Jarak tempuh Desa Kedungbanjar ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit. Berikut kondisi geografis Desa Kedungbanjar secara umum, berdasarkan data profile desa tahun 2013.

a) Luas Wilayah Desa Berdasarkan Penggunaan Tanah

- Pemukiman Umum 105 Ha
- Perkantoran 0,5 Ha
- Sekolah 0,5 Ha
- Jalan 2,7 Ha
- Sawah irigasi semi Teknis 19,32 Ha
- Sawah Tadah Hujan 151,3 Ha
- Ladang/Tegalan Ha
- Tanah Kas Desa 4,29 Ha
- Makam 2,6 Ha
- Waduk Desa Ha
- Lapangan Sepak bola 0,5 Ha

b) Kesuburan Tanah

- Subur 125,6 Ha
- Sedang 19,4 Ha

c) Iklim

- Curah Hujan 1.775 Mm
- Jumlah Bulan Hujan 7 bulan

d) Infrastruktur yang Melintasi Desa

- Jalan Kecamatan 4.000 m
- Jalan Kabupaten 3.000 m

e) Fasilitas Penunjang Pertanian

- Mata air/Sumur Ladang/Patek 15 titik
- Saluran Primer 1
- Saluran Skunder 3
- Saluran Tersier

f) Fasilitas Penunjang Permukiman

- Sumur Gali 255 buah dengan jumlah pengguna 315 KK
- Perpipaan 175 buah dengan jumlah pengguna 230 KK
- Sumur pompa 20 buah dengan jumlah pengguna 70 KK

2.1.2.2 KEPENDUDUKAN**a. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	1.250 orang
2.	Perempuan	1.212 orang
3.	Kepala keluarga	615 KK

b. Pertumbuhan Penduduk

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah penduduk tahun ini	2.462 orang
2.	Jumlah penduduk tahun lalu	2.435 orang

c. Struktur Mata Pencarian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	674 orang
2.	Pekerja di sektor jasa/perdagangan	60 orang
3.	Pekerja di sektor industri	28 orang

d. Status Mata pencarian Penduduk di Bidang Jasa/Perdagangan

No	Status	Jumlah (Orang)	
		Pemilik	Pekerja
1.	Pegawai Desa	11	
2.	PNS	36	
3.	ABRI/TNI	15	
4.	Guru	22	
6.	Bidan	2	
7.	Mantri kesehatan/Perawat	4	
8.	Pensiunan ABRI/Sipil	2	
9.	Pegawai Swasta	24	

10.	Warung	12	
11.	Toko	35	
12.	Tukang Kayu	12	
13.	Tukang Batu	15	
14.	Tukang Jahit/Bordir	4	
15.	Tukang Cukur	1	

e. Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Uraian
1.	Pasangan usia subur (PUS)	392 orang
2.	Jumlah akseptor KB menurut umur	
	1. kurang dari 20 th	19 orang
	2. 21 – 30 th	154 orang
	3. 31 – 40 th	106 orang
	4. lebih dari 40 th	112 orang

f. Kesejahteraan penduduk

Prasejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Kaya
105 KK	176 KK	122 KK	113 KK	99 KK

Menurut Data Administrasi Desa Kedungbanjar, bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Kedungbanjar sekitar 784 Orang atau sekitar 30,05 % dari 2.462 Jiwa jumlah penduduk Desa Kedungbanjar. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di desa tersebut, hanya jika kapasitas SDM didukung dengan kualitas dan potensi yang ada di desa tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor tingkat produktifitas penduduk, jumlah peningkatan penduduk yang pada tahun 2012 mencapai 2.435 jiwa meningkat menjadi 2.462 jiwa pada tahun 2013, sehingga terjadi peningkatan cuma 27 jiwa selama kurun waktu tahun 2012 ke tahun 2013.

Tingkat kemiskinan di Desa Kedungbanjar termasuk tinggi. Dari jumlah 615 KK di atas, sejumlah 105 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 176 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 122 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 113 KK tercatat Keluarga Sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka terdapat 281 KK Desa Kedungbanjar adalah keluarga miskin.

2.1.2.3 PENDIDIKAN

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

a. Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 keatas yang buta huruf	85 Orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	415 Orang
3.	Penduduk tamat SD/Sederajat	628 Orang
4.	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	375 Orang
5.	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	260 Orang
6.	Penduduk tamat D – 1	15 Orang
7.	Penduduk tamat D – 2	30 Orang
8.	Penduduk tamat D – 3	24 Orang
9.	Penduduk tamat S – 1	17 Orang
10.	Penduduk tamat S – 2	7 Orang
11.	Penduduk tamat S- 3	3 Orang

b. Kualitas Angkatan Kerja

No	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/ sederajat	85 Orang
2.	Jumlah angkatan kerja tamat SD/ sederajat	315 Orang
3.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/ sederajat	328 Orang
4.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/ sederajat	75 Orang
5.	Jumlah angkatan kerja tamat Diplamah /sederajat	10 Orang
6.	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	35 Orang

b. Pengangguran

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Usia 15 – 55 Tahun yang belum bekerja	232 orang
2.	Jumlah Angkatan Kerja 15 – 55 Tahun	938 orang

c. Remaja putus sekolah

No	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah remaja	470 orang
2.	Remaja putus sekolah SD / sederajat	6 orang
3.	Remaja putus sekolah SLTP / sederajat	15 orang
4.	Remaja putus sekolah SLTA / sederajat	20 orang
5.	Remaja putus Kuliah	3 orang

d. Wajib belajar 9 tahun

No	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 th	470 orang
2.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 th yang masih sekolah	426 orang
3.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 th yang tidak sekolah	44 orang

Dari di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Kedungbanjar mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD s/d SMA), bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini dipengaruhi kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, serta faktor ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dijadikan pendukung kualitas ekonomi masyarakat untuk menuntut pendidikan yang lebih baik. Meskipun demikian jumlah remaja yang putus sekolah juga mencapai angka yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung.

Meskipun demikian, terdapat 232 jumlah penduduk usia produktif yang masih belum bekerja. Hal ini disebabkan faktor ekonomi keluarga yang belum mencukupi dalam hal pembiayaan pendidikan. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Kedungbanjar yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Kedungbanjar. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

2.1.2.4 KESEHATAN MASYARAKAT

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah

satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Kedungbanjar secara umum. Gambaran secara umum kesehatan masyarakat desa Kedungbanjar bisa dilihat dari tabel berikut ini :

a. Kematian Bayi

1.	Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	20 orang
2.	Jumlah kematian bayi tahun ini	- orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1.	Jumlah ibu melahirkan pada tahun ini	20 orang
2.	Jumlah ibu melahirkan mati tahun ini	- orang

c. Cakupan Imunisasi

1.	Cakupan iminisasi polio 3	15 orang
2.	Cakupan imunisasi DPT – 1	10 orang
3.	Cakupan imunisasi cacar	15 orang

d. Cakupan Pemenuhan air bersih

1.	Pengguna sumur galian	315 KK
2.	Pengguna Air PAM	- KK
3.	Pengguna air WSLIC	230 KK
4.	Pengguna sumur pompa	70 KK
5.	Pengguna Perpipaian Air	- KK
6.	Pengguna hidran umum	- KK
7.	Pengguna air sungai	KK
8.	Pengguna air waduk/Sungai	KK

e. Gizi Balita

1.	Jumlah balita	32 anak
2.	Balita gizi buruk	0 anak
3.	Balita gizi Kurang	0 anak
4.	Balita gizi Baik	32 anak

f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

1.	Jumlah Rumah Memiliki WC	345 buah
2.	Jumlah Rumah Memiliki Jamban	240 buah

g. Posyandu

1.	Jumlah Kelompok Penimbangan	4 Pokbang
2.	Jumlah Kunjungan BALITA	4 .Anak
	POKBANG I	
3.	Jumlah Kunjungan BUMIL	3 Bumil
4.	Jumlah Kunjungan LANSIA	2 .Lansia
5.	Jumlah Kader Posyandu	4 Kader
	POKBANG I	

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah tentang keadaan kesehatan masyarakat, ternyata terdapat banyak masyarakat dengan tingkat kesehatan yang rendah. Hal inilah kiranya yang perlu mendapat perhatian, karena di Desa Kedungbanjar ini tidak ada sarana prasarana yang bisa menunjang aktifitas pelayanan kesehatan di desa Kedungbanjar.

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Kedungbanjar, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Kedungbanjar, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Atau jikalau tidak maka yang berani mengajukan diri adalah mereka dari kalangan ekonomi menengah keatas.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu ataupun dikarenakan mereka dari kalangan yang berada. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa

jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa.

Pada bulan Mei 2013 kemarin masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung. Dengan tingkat partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi, hampir mencapai 99%. Ini adalah progress demokrasi yang cukup signifikan di desa Kedungbanjar.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Kedungbanjar mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Kedungbanjar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Kedungbanjar kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Kedungbanjar. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kedungbanjar yang cenderung Dinamis dan Agamis ini, menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Kultur yang kuat serta usaha masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya Desa dipegang kuat sebagai warisan nenek moyang mereka. Tak jarang ritual-ritual khusus dan keagamaan masih sering dilakukan. Dalam menjalankan kewajiban umat beragamanya, masyarakat desa Kedungbanjar didukung dengan fasilitas peribadatan yang tersebar luas hampir diseluruh wilayah perdusunnya.

Tabel 1
Fasilitas Peribadatan

No	Jenis Fasilitas Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	8
3.	Gereja	0
4.	Pura	0
5.	Wihara	0

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungbanjar yang sudah relative tinggi kualitas tingkat pendidikannya, namun tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Kedungbanjar baru tersedia di tingkat pendidikan dasar , sementara untuk pendidikan tingkat pertama dan menengah ke atas berada di tempat yang agak jauh.

Tabel 2
Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung PAUD	1
2.	Gedung TK	1
3.	Gedung SD	1
4.	Gedung SLTP	-
5.	Gedung SLTA	-

Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa Kedungbanjar di pengaruhi ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif baik ini berdampak pada kualitas produktifitas masyarakat.

Tabel 3
Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	PUSTU	-
2.	POSKEDES	1
3.	POSYANDU	-
4.	Balai Pengobatan	-

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kedungbanjar Rp. 1.400.000 perbulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kedungbanjar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,kehutanan jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 806 orang, yang bekerja disektor jasa/perdagangan berjumlah 60 orang, dan Sektor industri berjumlah 28 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 938 orang.

Dengan melihat data angka pengangguran di Desa Kedungbanjar masih cukup tinggi. Berdasarkan data penduduk dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 232 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 938 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Kedungbanjar.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kedungbanjar di dukung dengan Sumber Daya Alam yang ada di desa, yang berupa potensi agraris dan hutan dari berbagai sektor yang bisa dikembangkan sehingga menjadi mata pencaharian penduduk desa Kedungbanjar.

a. Pertanian**1. Hasil Tanaman Padi**

No	Jenis Padi	Luas (Ha)	Hasil Panen	
			Hasil (Ton/Ha)	Rupiah/ton
1.	Padi Sawah	224	8 ton/ha	3.000.000/ton
2.	Padi Ladang	-	-	-

2. Hasil Tanaman Palawija

No	Jenis Palawija	Luas (Ha)	Hasil Panen	
			Hasil (Ton/Ha)	Rupiah/ton
1.	Kedelai	25	4,8 ton/ha	7.000.000/ton
2.	Jagung	110	7,1 ton/ha	3.500.000/ton

3. Setatus kepemilikan pertanian tanaman pangan.

No	Status	Jumlah
1.	Pemilik Tanah sawah	429 orang
2.	Pemilik Tanah Tegalan/Ladang	- orang
3.	Buruh tani	205 orang
4.	Penyewa / Penggarap	89 orang

b. Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Hasil Panen	
			Hasil (Ton/Ha)	Rupiah/ton
1.	Tembakau	75	8,8 ton/ha	24.000.000

c. Peternakan

No	Jenis ternak	Jumlah
1.	Sapi Potong	181 ekor
2.	Kambing	77 ekor
3.	Ayam Buras	12.000 ekor
4.	Ayam Ras	3.000 ekor
5.	Domba	150 ekor
6.	Itik	70 ekor

d. Status kepemilikan Usaha Peternakan

No	Jenis ternak	Jumlah
1.	Sapi Potong	171 Orang
2.	Kambing	50 Orang
3.	Ayam Buras	6 Orang
4.	Ayam Ras	2 Orang
5.	Domba	50 Orang
6.	Itik	5 Orang
7.	Buruh Peternakan	45 Orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Luas wilayah Desa Kedungbanjar yang seluas 290 Ha, ini dibagi menjadi 4 Dusun, diantaranya :

Dusun Kedungbanjar dengan luas wilayah 20 Ha

Dusun Rambit dengan luas wilayah 90 Ha

Dusun Mloso dengan luas wilayah 120 Ha

Dusun Kedungpari dengan luas wilayah 60 Ha

Yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kedungbanjar, dari 4 dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT).

Didukung dengan kondisi sarana dan prasarana Desa yang berupa:

d. Transportasi

Panjang Jalan Desa 4.750 M dengan Rincian sebagai Berikut :

Jalan Aspal	: 250 m
Jalan Paving	: 500 m
Jalan Rabat Beton	: 2.550 m
Makadam/deltu	: 1.180 m
Tanah	: -

Jumlah jembatan yang ada di Desa Kedungbanjar ada 2 jembatan besar dan 2 jembatan sedang.

e. Jenis Fasilitas Pemerintahan Desa Kedungbanjar

No	Jenis Fasilitas Pemerintahan	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Kantor Kepala Dusun	-
3.	Kantor LPM	
4.	Kantor BPD	1
5.	Kantor PKK	1
6.	Kantor Karangtaruna	-
7.	Kantor GAPOKTAN	-
8.	Kantor HIPPA	-
9.	Koperasi Desa	-
10.	KUD	-

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kedungbanjar memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kedungbanjar tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Aparat Pemerintahan Desa

1.	Jumlah aparat/perangkat	orang
2.	Kepala desa	1 orang
3.	Sekdes	1 orang
4.	Kepala Seksi	5 orang
5.	Kepala Urusan	2 orang
6.	Kepala Dusun	4 orang
7.	Staf	orang

ORGANISASI DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN.

Kepala Desa	: GUNARTO, SE
Sekretaris Desa	: SUWANDOYO
Kaur Keuangan	: RUDIANTO ZUN
Kaur Umum	: SUDARTO
Kasi Pemerintahan	: JUPRI
Kasi Ekbang	: SAMIKIN
Kasi Kesejahteraan Masyarakat	: SAMIDJAN
Kasi Trantib	: KASIADI
Kasi Pemb.perempuan	: NANING HIDAYATI
Kepala Dusun Mloso	: EDY DWI SANTOSO
Kepala Dusun Rambit	: BASORI
Kepala Dusun Kedungpari	: SODIKIN
Kepala Dusun Kedungbanjar	: SUWONDO

KELEMBAGAAN DESA

Tabel 1
NAMA PENGURUS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUJITO,S.Pd	KETUA
2.	RUSMIN, S.Pd	WAKIL KETUA
3.	SISWONO, S.Pd	SEKRETARIS
4.	Drs. NURHADI	ANGGOTA
5.	WAHYU WIDODO	ANGGOTA
6.	IBNU ARFAN	ANGGOTA
7.	URIP	ANGGOTA
8.	EFENDI FASULIAN. S	ANGGOTA
9.	WARJITO	ANGGOTA
10.	SUBIYONO	ANGGOTA
11.	ISWANTO	ANGGOTA

Tabel 2
NAMA PENGURUS
LPM DESA KEDUNGBANJAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMIRAN, S.Pd	KETUA
2.	RIADI	SEKRETARIS
3.	RUMANI	BENDAHARA
4.	SUWARTO	ANGGOTA
5.	WARDI	ANGGOTA
6.	KASMI'UN	ANGGOTA
7.	TOHA	ANGGOTA
8.	SUPRIADI	ANGGOTA
9.	Drs.ISMAIL	ANGGOTA

Tabel 3
NAMA PENGURUS
KARANGTARUNA DESA KEDUNGBANJAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	SATRYO	KETUA
2.	BAKTIAR	SEKRETARIS
3.	GALIH	BENDAHARA
4.	ZAINU ROFIK	ANGGOTA
5.	WIDODO	ANGGOTA
6.	BENIE W	ANGGOTA
7.	YONO	ANGGOTA

Tabel 4
NAMA PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGBANJAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ny. GUNARTO, SE	KETUA
2.	SRI HIDAYATI. S	SEKRETARIS
3.	ZAENAB W	BENDAHARA
4.	SITI ZAENAB	ANGGOTA
5.	IIS ROCHMATIN, S.Pd	ANGGOTA
6.	YASMIATI	ANGGOTA
7.	RUPIAH	ANGGOTA
8.	RASTIN	ANGGOTA
9.	NANING H	ANGGOTA

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Kedungbanjar kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai

tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun secara manajemen administrasi pengurus masih perlu dilakukan pembinaan.

2.2.3 PEMBANGUNAN DESA KEDUNGBANJAR

Pembangunan yaang sudah dilaksanakan oleh Desa Kedungbanjar selama lima tahun kebelakang adalah sebagai berikut.

PEMBANGUNAN DESA KEDUNGBANJAR TAHUN ANGGARAN 2008 – 2012

TAHUN ANGGARAN 2008

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1.	Pengerasan jalan poros	Poros desa	40.000.000
2.	Penahan tanah	Kedungbanjar	5.000.000
3.	Jalan rabat beton	Kedungpari	30.000.000
4.	Pengerasan jalan lingkungan	Rambit	5.000.000

TAHUN ANGGARAN 2009

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1.	Rehabilitasi plengsengan dan MCK Kantoe Desa	Kedungbanjar	2.500.000
2.	Rehab Balai Desa	Kedungbanjar	35.000.000
3.	Pengerasan jalan Dusun	Rambit	5.000.000
4.	Pengerasan jalan Dusun	Mlosa	5.000.000

TAHUN ANGGARAN 2010

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan jalan rabat beton	Mloso	60.000.000
2.	Pembangunan jalan rabat beton	Rambit	55.000.000
3.	Peningkatan kualitas jalan desa	Kedungbanjar	40.000.000
4.	Penetrasi jalan dusun	1 dusun	40.000.000

TAHUN ANGGARAN 2011

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1.	Jalan rabat beton	Poros desa	50.000.000
2.	Jalan Pertanian	Rambit	40.000.000
3.	Jalan ranat beton	Poros desa	50.000.000

TAHUN ANGGARAN 2012

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran
1.	Jembatan	Kedungpari	40.000.000
2.	Jalan rabat beton	Poros Desa	50.000.000
3.	Jalan Rabat Beton	Kedungbanjar	55.000.000

Menganalisa pembangunan yang sudah dilaksanakan selama lima tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, prioritas pembangunan Desa Kedungbanjar berorientasi pada pembangunan fisik. Dari sarana dan prasarana transportasi yang menjadi fasilitas penunjang perekonomian desa, jalan poros desa dan jalan lingkungan desa, Normalisasi Saluran irigasi

pertanian warga desa. Serta fasilitas pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan desa.

Sumber danapun dari mulai Swadaya masyarakat, ADD, APBD Kabupaten, sampai dengan bantuan pihak ketiga, mendukung pembangunan Desa Kedungbanjar. Yang menjadi kajian penting adalah tingkat swadaya masyarakat Desa Kedungbanjar yang tinggi, terbukti dari pembangunan fasilitas umum yang dilaksanakan tahun 2008 mencapai Rp 40.000.000 hal ini menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat pada pembangunan desa. Pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, swadaya masyarakat terus meningkat walaupun jumlah peningkatanyatidak terlalu signifikan. Setelah adanya Program PNPM- Mandiri Perdesaan tingkat swadaya masyarakat juga menunjukkan tren yang positif, hal ini tinggal manajemen pemerintah desa untuk mengelolah potensi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

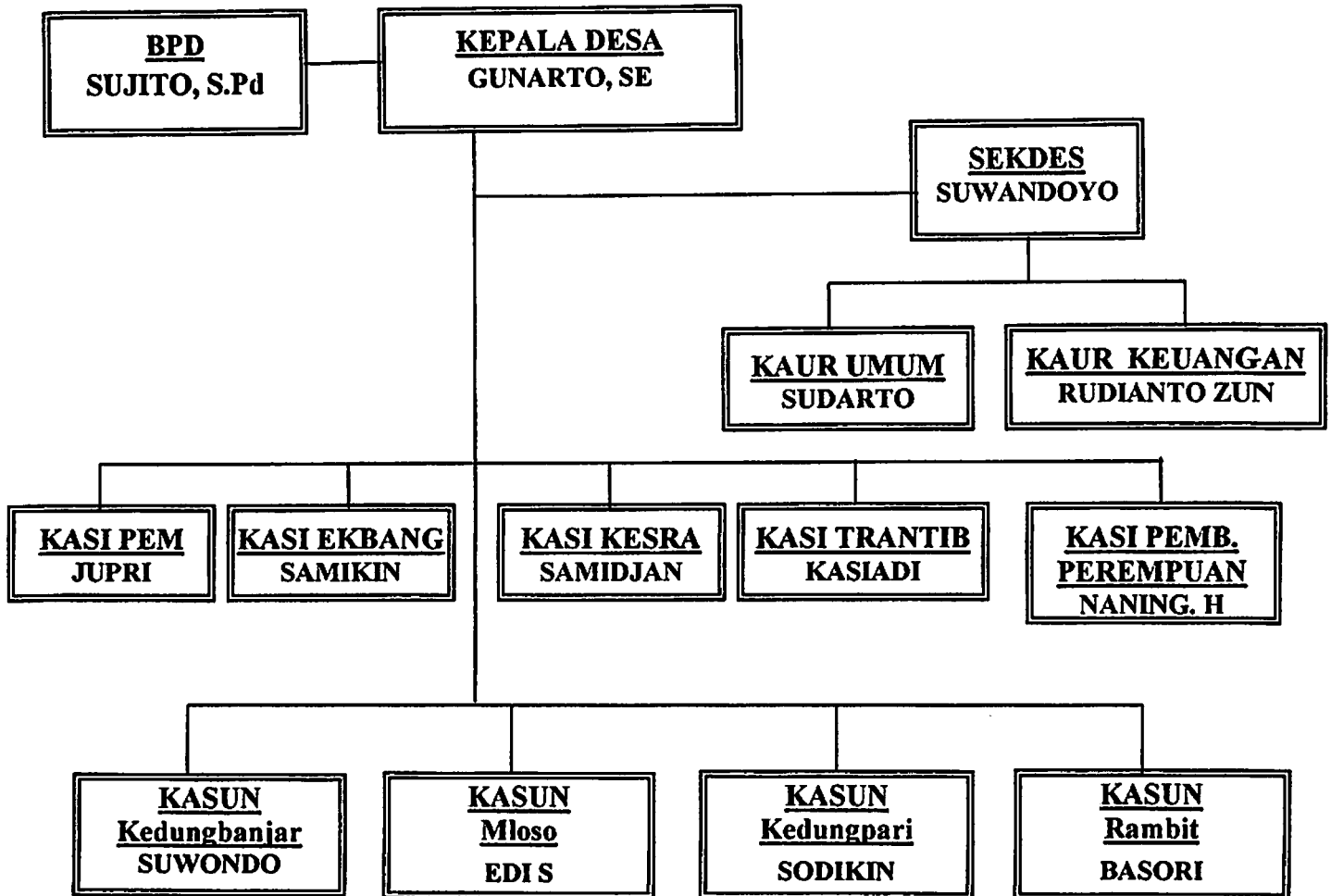
Dari identifikasi masalah yang diperoleh dari analisa potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Menunjukkan tingkatan masalah masih pada belum terselesaikannya pembangunan yang beroreientasi pada sarana dan prasarana fisik khususnya yang mendukung pertanian warga desa Kedungbanjar, yakni saluran irigasi. Selain Pembangunan sarana dan prasaran transportasi desa, pembangunan pada fasilitas pendidikan juga menjadi prioritas. Pada perencanaan pembangunan yang berorientasi pada

pemberdayaan dan kemandirian masyarakat menjadi perioritas pembangunan desa dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat.

Catatan :

Data Pada Bab II diambil dari data Profil desa tahun 2013

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA KEDUNGBANJAR



PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

BAB III
POTENSI DAN
MASLAH

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI

Desa Kedungbanjar memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

- 1) Lahan pertanian (sawah) seluas 170 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- 2) Lahan pertanian ladang/tegalan yang subur seluas 125,6 Ha, belum dikelola secara maksimal.
- 3) Tersedianya hewan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain. Yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk kandang sehingga bisa menjadi pendukung sektor pertanian masyarakat dan untuk pengurangan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.
- 4) Adanya hasil panen dari tanaman polowijo dan tembakau yang cukup melimpah yang dapat dijadikan modal peningkatan ekonomi pembangunan.
- 5) Adanya potensi sumber air tawar yang bisa digunakan untuk usaha perikanan air tawar.

3.1.2. Ekonomi

- 1) Besarnya penduduk usia produktif yang potensial untuk menunjang pembangunan desa.
- 2) Tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang relatif sedang juga dapat menjadi modal bagi pembangunan desa.
- 3) Adanya warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan tangan dan meubeler.
- 4) Adanya sentra peternak kambing yang ada pada masyarakat Desa Kedungbanjar khususnya di Dusun Kedungpari.
- 5) Banyaknya warga yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi mikro, sehingga ini bisa dijadikan modal bagi pembangunan Desa Kedungbanjar.

3.1.3. Pendidikan

- 1) Adanya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal baik berstatus negeri maupun swasta
- 2) Adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- 3) Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dari sebagian warga desa Kedungbanjar.

3.1.4. Kesehatan Lingkungan

Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun, dan adanya fasilitas gedung puskesmas yang memadai.

3.1.5. Politik, Sosial dan Budaya

- 1) Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan
- 2) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- 3) Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 4) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- 5) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

3.1.6. Kelembagaan / Organisasi

- 1) Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- 2) Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPM dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- 3) Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, Kelompok tani dan Kelompok keagamaan.

Faktor-faktor fisik yang diperlukan dalam perencanaan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrologi dan kendala-kendala fisik. Topografi merupakan factor penting dalam penentuan desain tata ruang lahan desa karena dapat

digunakan untuk menentukan arah saluran buangan air (drainase), dapat digunakan untuk memperkirakan kestabilan lereng dan dapat dijadikan dasar penentuan lahan yang layak untuk dikembangkan sebagai area pemukiman atau area pertanian, dll

Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana prasarana desa Kedungbanjar adalah tertera pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Volume
1.	Jalan Aspal	250 meter
2.	Jalan Makadam/deltu	1.180 meter
3.	Jalan Rabat beton	2.550 meter
4.	Jalan Paving	500 meter
5.	Sungai	-
6.	Saluran Irigasi	1.500 meter
7.	Waduk	-
8.	DAM	-
9.	Embung	-
10.	Pipanisasi air bersih	-

3.2 MASALAH

Daftar peta permasalahan hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Kedungbanjar yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn, Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara makro dirasakan oleh masyarakat di Desa Kedungbanjar.

1. Sumber Daya Alam

Terkait dengan sumber daya alam yang paling menjadi masalah adalah ketersediaan air irigasi pertanian yang masih belum memadai ketika musim kemarau tiba, sehingga hasil pertanian khususnya tanaman padi kurang optimal.

2. Sumber Daya Manusia

Secara sumberdaya manusia desa Kedungbanjar, memiliki potensi SDA yang cukup baik, tetapi permasalahannya mereka lebih memilih mengembangkan bakat dan karier mereka pada tempat lain, sehingga kurang menunjang pembangunan desa.

3. Ekonomi

Secara ekonomi permasalahannya adalah pada irigasi pertanian yang tidak berfungsi, harga hasil panen yang rendah, serta sulitnya mendapatkan saprodi dan sarpras pertanian, sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih serius dalam peningkatan pertanian, karena penghasilan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian ini. Disamping itu juga masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini juga akan menghambat pembangunan.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Kedungbanjar pada taraf sedang tapi masih banyak juga masyarakat desa Kedungbanjar yang berpendidikan di bawah wajib belajar sembilan tahun karena berbagai faktor yang menjadikan itu terjadi, di antaranya adalah kurang mempunyai keluarga dalam membiyai pendidikan anak-anaknya.

5. Kesehatan Lingkungan

Lingkungan kesehatan desa Kedungbanjar ada sebagian yang belum memenuhi angka minimal kesehatan lingkungan, walau sebagian warga sudah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan masing-masing tapi masih ada juga beberapa rumah penduduk yang belum punya jamban sendiri.

6. Politik, Sosial dan Budaya

Kondisi politik sosial dan budaya pada desa Kedungbanjar tidak ada persoalan yang hingga dapat menimbulkan masalah .

7. Kelembagaan/Organisasi

Kelembagaan dan organisasi pada desa Kedungbanjar sudah aktif dalam kegiatannya tetapi sarana prasarana penunjang kinerja lembaga yang masih kurang sehingga terkesan lamban dalam pelayanan publik .

**PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN**



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

BAB IV

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA**

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 VISI DAN MISI DESA KEDUNGBANJAR

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pelaku pembangunan desa pada masa yang akan datang. Visi juga menunjukkan bagaimana para pelaku pembangunan desa melihat, menilai atau memberi predikat terhadap desanda pada masa yang akan datang.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan desa dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa Desa kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan desa.

4.1.1. VISI DESA KEDUNGBANJAR

Yang menjadi Visi dari Desa Kedungbanjar adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Kedungbanjar yang maju, berkualitas, berbudi luhur dan berbudaya melalui Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi diri disegala bidang”

4.1.2. MISI DESA KEDUNGBANJAR

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Desa Kedungbanjar memiliki misi strategis sebagai bentuk kinerja mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sarana transportasi yang memadai, peningkatan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai.

4. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat demi ketentraman dan ketertiban umum dalam berbangsa dan bernegar
5. Meningkatkan SDM baik mental maupun sepiritual.

4.1.3. KETERKAITAN MISI DESA KEDUNGBANJAR DENGAN PERIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMONGAN.

- a. Keterkaitan Misi I dengan Prioritas Pembangunan di Kabupetan Lamongan

Misi 1 Desa Kedungbanjar mempunyai tujuan yang sama dengan Misi ke I Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan efektifitas kelembagaan pemerintah
2. Terwujudnya sistem administrasi pengelolaan kearsipan yang baik
3. Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
4. Pembinaan dan pengembangan aparatur

- b. Keterkaitan Misi II dengan Prioritas Pembangunan di Kabupetan Lamongan

Misi II Desa Kedungbanjar mempunyai tujuan yang sama dengan Misi I Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga-lembaga yang ada.
2. Terwujudnya peningkatan fungsi pemberdayaan aspirasi masyarakat.
3. Meningkatnya aspirasi masyarakat yang ditindakanjuti.

- c. Keterkaitan Misi III dan Misi IV dengan Prioritas Pembangunan di Kabupetan Lamongan

Misi III Desa Kedungbanjar mempunyai tujuan yang sama dengan Misi II Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan
2. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

3. peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
4. Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan
5. Meningkatnya koalitas seni dan budaya lokal

d. Keterkaitan Misi V dengan Prioritas Pembangunan di Kabupetan Lamongan

Misi III Desa Kedungbanjar mempunyai tujuan yang sama dengan Misi II Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan petani
2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
3. Meningkatkan produksi pertanian
4. Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian.

e. Keterkaitan Misi VI dengan Prioritas Pembangunan di Kabupetan Lamongan

Misi III Desa Kedungbanjar mempunyai tujuan yang sama dengan Misi V Kabupaten Lamongan yang mempunyai tujuan :

1. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Penentuan skala prioritas pembangunan di Desa berdasarkan sistim perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam Undang-undang : 25 Tahun 2004 serta Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dan acuan pokok penyusunan perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Dalam membuat perencanaan serta kebijakan tentulah harus melihat potensi Desa dan akar masalah di Desa

serta berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun yang lalu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pemetaan masalah dan potensi Desa berdasarkan tiga alat bantu yakni pemetaan masalah dan potensi Desa berdasarkan potret Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Dengan tetap memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat dan multistakeholder yang ada di Desa sebagai wujud dari pola pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif.

4.2.1.1. Analisa Hambatan dan Kekuatan Desa Kedungbanjar

Agar bisa mengukur serta membuat kebijakan strategis perlu juga di adakan analisa lingkungan di Desa Kedungbanjar baik internal maupun eksternal yang akan dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Analisa lingkungan tersebut di lihat berdasarkan pada pengelompokan masalah yang teridentifikasi pada potret Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Bagaimana Desa menentukan peringkat masalah dan tindakan pemecahan masalah juga menjadi analisa lingkungan Desa, hal ini berkaitan dengan keterkaitan masalah pada 7 bidang pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Desa. Disamping itu juga pada analisa penentuan peringkat tindakan yang berhubungan dengan langkah strategi pembangunan Desa Kedungbanjar kedepannya akan diarahkan.

TABEL PENGELOMPOKAN MASALAH DAN POTENSI DESA KEDUNGBANJAR

NO	PERMASALAHAN	POTENSI	PENGELOMPOKAN KOORDINATOR BIDANG							
			SARA NA PRASAR ANA	KESEH ATAN	PENDID IKAN	PEME RINTA HAN	SOSIAL BUDA YA	LINGKU NGAN HIDUP	EKONO MI	
1.	- Masih rendahnya kualitas sarana prasarana transportasi jalan poros Desa Kedungbanjar - Masih banyak jalan lingkungan dusun yang kondisinya masih memprihatinkan - Saluran Drainase yang masih kurang. - Kebutuhan akan air irigasi dan air bersih untuk kebutuhan rumag tangga di musim kemarau - Kwalitas badan jalan yang masih rendah, sehingga perlu pendmping jalan.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ Sumber Daya Manusia	X							
2.	- Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di desa Kedungbanjar - Pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai - Kurangnya dana pendukung untuk	✓ SWADAYA MASYARAKA ✓ BIDAN DESA ✓ KADER		X						

	peningkatan kesehatan masyarakat. ▪ Kurangnya fasilitas pendukung peningkatan pelayanan kesehatan. ▪ Kurangnya penyuluhan kesehatan	KESEHATAN							
3.	▪ Masih belum maksimalnya pengelolaan dan manajemen pendidikan di desa Kedungbanjar ▪ Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai, sehingga mengganggu proses belajar mengajar siswa ▪ Kesejahteraan tenaga pendidik yang masih kurang layak. ▪ Banyaknya siswa berprestasi tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ▪ Sarana prasarana pendidikan non formal yang masih kurang memadai.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ KOMITE SEKOLAH ✓ LEMBAGA DAN PENGURUS			X				

4.	▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan administrasi desa. ▪ Kurangnya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dalam peningkatan pelayanan publik ▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kelengkapan Kantor dan Balai Desa.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ PERANGKAT DESA						X			
	▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosial budaya ▪ Tidak adanya tenaga pengajar untuk pengembangan bakat dan minat para remaja ▪ Sarana olah raga yang masih kurang memadai ▪ Peningkatan sarana prasarana peribadatan.	✓ POTENSI PARA REMAJA ✓ SARANA PRASARANA PENGEMBANGAN BAKAT						X			
6.	▪ Masih kurangnya kesadaran warga akan arti penting lingkungan hidup yang sehat dan nyaman ▪ Masih kurangnya saluran drainase ▪ Masih kurangnya tanaman produktif yang bisa menghasilkan nilai ekonomis	✓ SWADAYA MASYARAKAT								X	

7.	▪ Masih rendahnya tingkat perekonomian warga masyarakat desa Kedungbanjar ▪ Masih tingginya angka pengangguran di desa Kedungbanjar ▪ Kekurangan modal bagi para pelaku ekonomi menengah dan kecil ▪ Kekurangan sarana produksi dan modal, bibit dan obat-obatan bagi para petani ▪ Kekurangan modal bagi para peternak	✓ ADANYA POKMAS ✓ SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ✓ Potensi Sumber daya alam ✓ Gapoktan				X			
----	---	--	--	--	--	---	--	--	--

Dari tabel pengelompokan masalah yang teridentifikasi di Desa Kedungbanjar, banyaknya pengelompokan, hampir semua bidang menjadi masalah, khususnya masalah pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi catatan tersendiri dari Desa untuk segera diwujudkan sebagai program pembangunan Desa. Dari daftar tersebut, lebih banyak pembangunan fisik yang berorientasi pada pembangunan yang menunjang tingkat perekonomian masyarakat. Pembangunan pada sarana transportasi Desa yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas perekonomian di bidang pertanian. Berikut beberapa analisa dari pengelompokan masalah:

1. Sarana fisik jalan menjadi faktor penting sebagai sarana mobilitas warga Desa yang sementara ini masih kurang layak.
2. Masalah pengadaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga juga menjadi prioritas pembangunan jangka menengah desa Kedungbanjar.
3. Sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi prioritas untuk program pembangunan lima tahun mendatang.
4. Keterbatasan anggaran untuk penunjang peningkatan kesehatan masyarakat desa Kedungbanjar juga masih menjadi prioritas.
5. Keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang kurang bisa menunjang proses belajar mengajar, dan banyaknya siswa yang kurang mampu yang tidak bisa melanjutkan sekolah.
6. Terwujudnya lingkungan hidup yang memenuhi prasarat untuk hidup sehat, sehingga perlu terciptanya lingkungan yang sehat.
7. Sarana prasarana bidang sosial budaya dan juga pengembangan bakat dan potensi warga, khususnya generasi muda juga menjadi prioritas pembangunan jangka menengah desa Kedungbanjar dalam lima tahun mendatang.
8. Kesehatan menjadi modal utama dalam melaksanakan program pembangunan desa, sehingga masalah kesehatan juga menjadi prioritas dalam pembangunan desa.
9. Masalah pelayanan masyarakat juga menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah desa. Kurangnya sarana penunjang kinerja perangkat dalam pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat terkesan lamban.
10. Peningkatan perekonomian masyarakat juga menjadi prioritas, masih banyak warga yang memiliki penghasilan dibawah UMR. Sehingga dapat menghambat program pembangunan desa.

4.2.1.2. Analisa Penentuan Peringkat Masalah

Dari tabel penentuan peringkat masalah diatas, beberapa urutan prioritas masalah dalam perencanaan pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana transportasi khususnya jalan poros Desa Kedungbanjar selama ini menjadi akses utama perekonomian masyarakat Desa Kedungbanjar.
2. Sarana transportasi jalan lingkungan dan Dusun masih banyak yang membutuhkan perbaikan.
3. Pembangunan pendamping tanah /TPT untuk jalan poros Desa dan jalan lingkungan juga masih menjadi prioritas pembangunan jangka menengah Desa.
4. Pembangunan Sarana prasarana irigasi pertanian juga menjadi perioritas pembangunan jangka menengah Desa, untuk peningkatan produksi pertanian.
5. Pembangunan Gedung sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi prioritas untuk dibangun dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa. Karena sarana gedung yang belum memadai.
6. Pembangunan srana air bersih untuk kebutuhan air rumah tangga.
7. Banyaknya siswa yang berprestasi tapi kurang mampu juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbanjar.
8. Fasilitas sarana prasarana perkantoran di Kantor dan Balai Desa Kedungbanjar yang masih minim dan sumberdaya manusia yang kurang memadai ,sehingga pelayanan kepada warga belum maksimal.
9. Untuk memperindah dan sebagai identitas Desa, maka diperlukan adanya Gapura masing-masing Dusun
10. Kelengkapan sanitasi juga masih perlu diperhatikan, krena masih banyak warga yang belum memiliki MCK.
11. Makanan tambahan bagi balita dan sarana penunjang kegiatan bagi kesehatan juga merupakan prioritas.
12. Tambahan modal bagi para pelaku ekonomi menengah dan kecil, yang nantinya dapat meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan keluarga.
13. Banyaknya warga yang memiliki keahlian dalam hal kerajinan ,khususnya ibu-ibu,dan ini merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga.
14. Fasilitas olah raga untuk kegiatan pemuda di Desa Kedungbanjar, Pembinaan serta pelatihan untuk organisasi kepemudaan dan karang taruna Desa Kedungbanjar.

4.2.1.3. Analisa Pengkajian Tindakan Masalah

Dari tabel hasil pengkajian tindakan masalah diatas, tindakan yang layak untuk ditempuh dalam menyelesaikan masalah Desa Kedungbanjar adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan sarana dan prasarana (jalan paving) untuk jalan poros desa , jalan Dusun dan jalan lingkungan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi.
3. Pembangunan sarana prasarana jalan pertanian
4. Pembangunan TPT untuk jalan poros Desa dan jalan lingkungan
5. Pembangunan sarana prasarana penunjang Kantor dan Balai Desa
6. Pembangunan sarana dan prasarana gedung pendidikan khususnya gedung TK dan TPQ
7. Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan.
8. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Desa dengan peningkatan kapasitas struktural pemerintahan Desa.
9. Pembangunan jembatan sebagai penghubung arus transportasi dan ekonomi warga
10. Pengadaan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam kinerja setiap lembaga organisasi masyarakat Desa. Dan kelengkapan sarana prasarana dalam pemerintahan.
11. Pembangunan Gapura Masuk Dusun
12. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan pembangunan sarana penunjang bagi kesehatan warga.
13. Pembangunan Gedung Poskesdes
14. Pembangunan MCK
15. Pembentukan lembaga keuangan yang memberikan kredit lunak bagi warga, dan pelatihan bagi UKM.
16. Peningkatan kapasitas bagi para ibu-ibu yang memiliki ketrampilan baik itu dalam hal pembuatan kue maupun bagi para peternak
17. Bantuan bagi para peternak kambing dan ikan lele
18. SPP (Simpam Pinjam Perempuan)
19. Bantuan hand tractordan pompa air bagi para petani
20. Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana olah raga bagi remaja desa, sehingga dapat menyalurkan bakat .
21. Pembangunan sarana prasarana kelengkapan peribadatan.

Dalam rangka pencapaian tindakan yang layak tersebut berbagai kebijakan pembangunan telah ditempuh oleh Pemerinatah Desa Kedungbanjar dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang telah kelihatan hasilnya. Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih tersisa banyak hal yang harus segera di tangani, mengingat begitu banyak permasalahan dan kompleknya segala urusan yang ada di tengah masyarakat Desa Kedungbanjar seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat itu sendiri.

Dari persoalan di atas kiranya dapat di paparkan segala hal yang berkaitan dengan kekuatan dasar yang dimiliki Desa Kedungbanjar sebagai dasar serta modal untuk melaksanakan proses pembangunan di setiap tahunnya. Adapun kekuatan tersebut dapat kami gambarkan di bawah ini :

1. Bidang Sarana Prasarana

Merupakan modal dasar bagi pembanguna desa, dengan sarana infrasruktur yang memadai maka,kegiatan perekonomian warga dan roda pembangunan desa akan berjalan dengan apa yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi pembangunan desa Kedungbanjar.

2. Bidang Pendidikan

Dengan potensi Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya saing yang tinggi,yang berahlag mulia, terutama dalam era globalisasi ini,menjadi modal utama dalam pembangunan desa untuk jangkah menengah dan jangkah panjang.

3. Bidang Kesehatan

Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik, tentunya dapat menjadi modal utama dalam menunjang pembangunan desa.

4. Bidang Sosial Budaya

Banyaknya Ormas di Desa Kedungbanjar seperti Fatayat, Muslimat, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Darmawanita, Posyandu, dan Kelompok Arisan merupakan aset Desa yang bermanfaat untuk di jadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Desa pada masyarakat.Disamping itu juga dengan adanya bakat dan potensi remaja juga menjadi modal pembangunan.

5. Bidang Pemerintahan.

Desa Kedungbanjar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik, tetapi terkadang proses administrsinya yang agak lambat, dan diharapkan dengan dipenuhinya sarana penunjang proses administrasi dan pelatihan bagi perangkat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada warga.

6. Koperasi dan Usaha Masyarakat

Sebagian dari masyarakat desa Kedungbanjar adalah pengrajin, dan para peternak, tentunya ini apabila dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional dan dengan bantuan tambahan modal dapat dijadikan modal dalam pembangunan desa Kedungbanjar.

7. Lingkungan Hidup

Dengan kondisi lingkungan hidup yang higienis dan tertata rapi serta adanya ruang hijau bagi publik, maka dapat menunjang pembangunan pemerintahan desa Kedungbanjar.

4.2.1.4. Analisa Penentuan Peringkat Tindakan

Dari analisa penentuan peringkat tindakan tersebut diatas, peringkat tindakan masalah Desa Kedungbanjar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana (jalan paving) untuk jalan poros desa dan lingkungan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi.
3. Pembangunan TPT untuk jalan poros Desa dan jalan lingkungan
4. Pembangunan jalan pertanian
5. Pembangunan jembatan
6. Pembangunan sarana prasarana penunjang Kantor dan Balai Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana gedung pendidikan khususnya gedung TK dan TPQ
8. Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan.
9. Pembangunan Gedung Poskesdes.
10. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Desa dengan peningkatan kapasitas struktural pemerintahan Desa.
11. Pengadaan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam kinerja setiap lembaga organisasi masyarakat Desa. Dan kelengkapan sarana prasarana dalam kegiatan pelayanan masyarakat.
12. Pembangunan Gapura Masuk Dusun
13. Gedung perpustakaan
14. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan pembangunan sarana penunjang bagi kesehatan warga.
15. Pembangunan MCK masing-masing dusun.

16. Pembentukan lembaga keuangan yang memberikan kredit lunak bagi warga, dan pelatihan bagi UKM.
17. Peningkatan kapasitas bagi para ibu-ibu yang memiliki ketrampilan baik itu dalam hal pembuatan kue dan juga bagi para peternak.
18. Bantuan bagi para peternak kambing dan ikan lele
19. SPP (Simpam Pinjam Perempuan)
20. Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana olah raga bagi remaja desa, sehingga dapat menyalurkan bakat .
21. Pembangunan sarana prasarana kelengkapan peribadatan.
22. Bantuan Hand tractor, pompa air dan bibit pertanian serta obat-obatan bagi para petani

Dari pengembangan Analisa peringkat tindakan tersebut beberapa Kekuatan Desa Kedungbanjar tidak bisa lepas dari hambatan-hambatan yang muncul jika kita lakukan analisa yang mendalam. Hambatan bisa jadi peluang jika kita lakukan analisa juga deteksi sedini mungkin agar prioritas pembangunan bisa di capai serta dalam pelaksanaan di lapangan bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan.

Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Bidang Sarana prasarana

Lokasi Desa Kedungbanjar yang ditengah hutan, sehingga tanah labil dan membuat jalan mudah rusak. Disamping itu juga yang menjadi kendala adalah

2. Bidang Kesehatan

Kurang tersosialisasinya segala produk hukum yang ada pada masyarakat Desa sehingga sering terjadi perbedaan pandang di tengah masyarakat terkait proses pembangunan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa dalam merealisasikan segala program yang ada. Dan disamping itu pula ketiadaan sarana prasarana penunjang kegiatan kesehatan juga menjadi kendala.

3. Bidang Pendidikan

Pola pikir dari masyarakat akan arti penting dunia pendidikan bagi anak-anak mereka, dan banyaknya Ormas serta Organisasi di tingkat Desa yang mana Visi dan Misi mereka juga bervariasi menyebabkan terjadinya kompetisi yang kurang sehat antar organisasi.

Dari lembaga pendidikan yang ada di desa rata-rata jika dilihat dari segi Fisik serta infrastruktur masih perlu dibangun jika tidak akan bisa menghambat proses

belajar mengajar siswa yang akhirnya akan memberikan out put yang kurang bagus jika persoalan ini tidak bisa ditangani. Juga tenaga pengajar yang membutuhkan banyak dukungan baik secara kompetensi materi maupun materiil.

4. APBDes Kedungbanjar

Keterbatasan kemampuan APBDes Desa Kedungbanjar untuk membiayai segala program pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan yang direncanakan sangat berpengaruh terhadap bantuan dari APBD Kabupaten. APBD Propinsi dan APBN.

5. Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat.

Etos kerja perangkat Desa kurang maksimal itu di sebabkan kesejahteraan mereka belum tercukupi secara layak, kompetensi perangkat yang masih membutuhkan banyak pelatihan tentang pemerintahan, dan juga tidak lengkapnya struktur perangkat Desa yang berakibat kurang maksimalnya pelayanan publik.

4.2.2. POTENSI DAN MASALAH

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Kedungbanjar yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah dan Potensi yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat berdasarkan alat kaji:

a. Daftar Masalah dan Potensi dari Potret Desa

TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA KEDUNGBANJAR

NO	MASALAH	POTENSI
1.	✓ Masih rendahnya kualitas sarana prasarana transportasi di desa Kedungbanjar, khususnya jalan poros desa dan jalan lingkungan, dan jembatan. ✓ Labilnya struktur tanah di Desa Kedungbanjar ✓ Kekurangan air untuk kebutuhan sektor pertanian ✓ Kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga	▪ Swadaya masyarakat ▪ SDM
2	✓ Masih rendahnya kualitas kesehatan warga masyarakat desa Kedungbanjar ✓ Sarana prasarana yang kurang mendukung untuk program peningkatan kesehatan masyarakat.	▪ Bidan desa ▪ Kader posyandu
3.	✓ Masih rendahnya kwalitas sarana prasarana pendidikan desa Kedungbanjar ✓ Banyaknya siswa berprestasi yang tidak mampu meneruskan sekolah karena terbentur masalah ekonomi. ✓ Sarana dan prasarana pendidikan agama yang dirasa masih kurang menunjang dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa Kedungbanjar.	▪ Swadaya masyarakat ▪ Komite sekolah ▪ Pengurus dan anggota

4.	✓ Pelayanan masyarakat oleh perangkat desa yang dirasakan masih kurang maksimal ✓ Sarana pendukung kinerja perangkat dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. ✓ Sarana prasarana untuk kegiatan pemerintahan yang masih belum memadai. ✓ Masih minimnya sarana identitas Desa maupun Dusun	• Perangkat • Swadaya masyarakat
5.	✓ Kurangnya program pengembangan bakat dan potensi sosial budaya ✓ Sarana dan prasarana yang mampu mengakomodir kegiatan sosial budaya warga masyarakat desa Kedungbanjar.	• Bakat dan potensi • Lembaga dan pengurus
6.	✓ Rendahnya kualitas lingkungan hidup ✓ Pemukiman penduduk yang kumuh	▪ Lahan ▪ Swadaya warga masyarakat
7.	✓ Kekurangan modal bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah ✓ Kurangnya modal bagi para petani, khususnya ketika tiba musim tanam. ✓ Kurangnya program bantuan bagi para petani untuk peningkatan produktivitas pertanian	▪ Pemanfaatan kelompok tani ▪ Program SPP ▪ Poktan

b. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

TABEL GAMBAR KALENDER MUSIM DESA KEDUNGBANJAR

NO	MASALAH	PENGHUJAN						PANCARoba			KEMARAU			
		DES	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	
1.	PANEN RAYA			❖	❖									
2.	PANEN POLOWIJO							❖	❖		❖	❖		
3.	KEKURANGAN AIR BERSIH										❖	❖	❖	
4.	KEKURANGAN AIR IRIGASI	❖										❖	❖	
5.	WABAH PENYAKIT		❖						❖	❖				
6.	PACEKLIK	❖	❖											
7.	JALAN BECEK DAN BERLUBANG	❖	❖	❖										

TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA KEDUNGBANJAR

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Rendahnya harga jual hasil panen akibat terganggunya arus transportasi dalam menjual hasil panen	- Kelompok tani - Hasil panen
2.	Rendahnya kualitas jalan ketika memasuki bulan penghujan, jalan menjadi becek dan berlubang	- APBDes - Swadaya masyarakat
3.	Kurangnya air bersih untuk irigasi pertanian dan konsumsi rumah tangga utamanya pada musim kemarau	- Sungai
4.	Timbulnya wabah penyakit , khususnya pada bulan –bulan pergantian musim	- Bidan Desa - Kader posyandu
5.	Penurunan pendapatan ekonomi ketika musim paceklik tiba	- SPP - KOPWAN
6.	Kekurangan modal untuk proses produksi pertanian,khususnya awal musim tanam tiba. Kekurangan bibit unggul dan obat-obatan ketika memasuki musim tanam tiba	- Kelompok tani

c. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelenbagaan

TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA KEDUNGBANJAR

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Tidak adanya kegiatan yang berjenjang	Adanya Pengurus
2.	POKTAN	- Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan - Kurangnya bantuan modal	Pengurus
3.	PEMERINTAH DESA	- Kurangnya fasilitas pendukung kerja administrasi - Identitas Desa	Adanya perangkat
4.	KARANG TARUNA	- Kurangnya dana pendukung kegiatan - Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan	- Adanya pengurus - Adanya fasilitas
5.	BPD/LPM	- Belum adanya kantor - Peningkatan kapasitas	Adanya pengurus
6.	TPQ	- Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan pengajaran - Tunjangan para pendidik	Adanya pengurus

d. Daftar Analisa Penentuan peringkat Masalah**TABEL DAFTAR ANALISA PENENTUAN MASALAH**

No	Masalah	Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi	Nilai
1.	Pembangunan sarana dan prasarana (jalan paving) untuk jalan poros desa dan lingkungan.	8	8	8	8	8	40
2.	Pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi.	8	9	8	8	7	40
3.	Pembangunan TPT untuk jalan poros Desa dan jalan lingkungan	8	9	8	8	7	40
4.	Pembangunan jalan pertanian	8	8	8	8	8	40
5.	Pembangunan jembatan	8	9	8	7	7	39
6.	Pembangunan sarana prasarana penunjang Kantor dan Balai Desa	7	7	7	8	8	37
7.	Pembangunan sarana dan prasarana gedung pendidikan khususnya gedung TK dan TPQ	8	7	7	8	8	38
8.	Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan.	9	7	7	5	8	36

9.	Pembangunan Gedung Poskesdes.	8	8	5	7	6	34
10.	Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Desa dengan peningkatan kapasitas struktural pemerintahan Desa.	8	8	8	8	7	39
11.	Pengadaan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam kinerja perangkat sarana prasarana dalam kegiatan pelayanan masyarakat.	8	7	6	6	8	35
12.	Pembangunan Gapura Masuk Dusun	8	7	6	6	8	35
13.	Gedung perpustakaan	9	8	4	6	7	34
14.	Pemberian makanan tambahan bagi balita dan pembangunan sarana penunjang bagi kesehatan warga.	8	7	7	6	8	36
15.	Pembangunan MCK masing-masing dusun.	8	7	8	7	8	38
16.	Pembentukan lembaga keuangan yang memberikan kredit lunak bagi warga, dan pelatihan bagi UKM.	8	8	5	7	6	34
17.	Peningkatan kapasitas bagi para ibu-ibu yang memiliki ketrampilan baik itu dalam	8	8	8	8	7	39

	hal pembuatan kue dan juga bagi para peternak.								
18.	Bantuan bagi para peternak kambing dan ikan lele	8	7	6	6	8			35
19.	SPP (Simpam Pinjam Perempuan)	8	7	6	6	8			35
20.	Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana olah raga bagi remaja desa, sehingga dapat menyalurkan bakat .	9	8	4	6	7			34
21.	Pembangunan sarana prasarana kelengkapan peribadatan.	8	7	7	6	8			36
22.	Bantuan Hand tractor , pompa air dan bibit pertanian serta obat-obatan bagi para petani	8	7	8	7	8			38

4.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungbanjar adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan yang partisipatif yang dalam tataran diera reformasi dan otonomi daerah ini pendekatan yang di pakai adalah lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan. Berangkat dari semangat di atas maka untuk melakukan prioritas dan kebijakan pembangunan Desa telah di susun sebagai berikut :

a. Isu Dan Permasalahan Strategis Desa Kedungbanjar.

Untuk melakukan prioritas dan kebijakan pembangunan Desa Kedungbanjar kiranya harus berangkat dari isu dan permasalahan strategis Desa Kedungbanjar sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana transportasi khususnya jalan poros desa Kedungbanjar, jalan poros Dusun dan saluran irigasi yang menjadi penunjang kegiatan masyarakat dibidang pertanian guna peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kedungbanjar.
2. Pembangunan Sarana prasarana pelayanan masyarakat berupa kantor dan balai Desa.
3. Sarana transportasi jalan lingkungan, jalan pertanian, jalan poros antar dusun dan jembatan masih banyak yang membutuhkan perbaikan.
4. Pembangunan Gedung sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi prioritas untuk dibangun dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa. Karena sarana gedung yang belum memadai.
5. Banyaknya siswa yang berprestasi tapi kurang mampu juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungbanjar.
6. Fasilitas sarana prasarana perkantoran di Kantor Desa Kedungbanjar yang msih minim dan sumberdaya manusia yang

- kurang memadai ,sehingga pelayanan kepada warga belum maksimal.
7. Sarana prasarana kesehatan dan kelengkapan sanitasi juga masih perlu diperhatikan, krena masih banyak warga yang belum memiliki MCK.
 8. Makanan tambahan bagi balita dan sarana penunjang kegiatan bagi kesehatan juga merupakan prioritas.
 9. Tambahan modal bagi para pelaku ekonomi menengah dan kecil, termasuk para peternak yang nantinya dapat meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya dapat menambah pendapatan keluarga.
 10. Banyaknya warga yang memiliki keahlian dalam hal kerajinan ,khususnya ibu-ibu, dan ini merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga.
 11. Fasilitas olah raga untuk kegiatan pemuda di Desa Kedungbanjar, Pembinaan serta pelatihan untuk organisasi kepemudaan dan karang taruna Desa Kedungbanjar.
 12. Bantuan modal usaha dan bantuan sarana produksi bagi para petani juga masih menjadi prioritas untuk pembangunan jangka menengah Desa Kedungbanjar.

b. Prioritas Dan Kebijakan Pembangunan Desa Kedungbanjar.

Berdasarkan isu strategis di Desa Kedungbanjar yang kami paparkan di atas dan juga hasil penggalian gagasan melalui metode angket pada masyarakat Desa Kedungbanjar, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013 – 2018 Pemerintah Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio menyusun dokumen RPJMDesa dengan membuat skala prioritas pembangunan di Desa. Secara ringkas hasil analisa masalah dan potensi Desa Kedungbanjar tersebut menunjukkan ada beberapa persoalan yang muncul yang harus segera di selesaikan serta menjadi skala prioritas tindakan pemecahan masalah yaitu ada 5 (lima) program utama. 5 (lima) program utama tersebut adalah :

1. Program Prioritas I

1. Pembangunan jalan paving jalan poros Desa Kedungbanjar – Sidorejo
2. Pembangunan jalan paving jalan poros Kedungbanjar – Karangsambigalih
3. Pembangunan jalan paving jalan dusun dan lingkungan masing-masing Dusun.
4. Pembangunan Poskesdes.
5. Pembangunan TPT
6. Pembangunan Saluran irigasi

2. Program Prioritas II

1. Pembangunan Gapura masuk Dusun.
2. Pembangunan jalan pertanian
3. Pembangunan Gedung TK dan TPQ
4. Pembangunan Jembatan.
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Program Prioritas III

1. Pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.
2. Pembangunan Perpustakaan Desa
3. PMT bagi balita
4. Pengadaan alat komputer dan pelatihan komputer bagi perangkat desa Kedungbanjar.
5. Pembangunan drainase lingkungan

4. Program Prioritas IV

1. Pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi para usaha kecil-menengah, dan para peternak/ petambak
2. Pemberian kredit Lunak bagi warga pelaku ekonomi kecil dan menengah.
3. Bantuan hand tractor dan pompa air
4. Bantuan modal usaha bagi para petani

5. Program Prioritas V

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarang olah raga.
2. Pembuatan MCK di masing-masing dusun
3. Rehabilitasi sarana prasarana peribadatan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama lima tahun bagi Desa Kedungbanjar. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari enam dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat penting merupakan inti dari RPJM Desa Kedungbanjar.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa Kedungbanjar.

Berikut ini adalah tabel program pembangunan Desa Kedungbanjar selama lima tahun (2013 – 2018) :

NO	TINDAKAN YANG LAYAK	ESTIMASI ANGGARAN	SP ANGGARAN	VOLUME	LOKASI
1.	Pembangunan jalan paving jalan poros desa	350.000.000	APBN/PNPM	2.000 x 3 M	Kedungbanjar-Sidorejo
2	Pembangunan jalan paving jalan poros desa	250.000.000	APBN/PNPM	1.500 x 3 M	Kedungbanjar-Karangsambigalih
3.	Pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi.	200.000.000	APBN	1.000 x 0,5 M	Kdungbanjar
4.	Pembangunan TPT untuk jalan poros Desa	275.000.000	APBD / APBD I	1.000 x 0.75 x 0,3 M	Jalan poros/4 dusun
5.	Pembangunan jalan pertanian	115.000.000	APBD / APBD I	500 x 2 x 0,12 M	Rabit
6.	Pembangunan jembatan	85.000.000	APBD / APBD I	6 x 2,5 M	Mloso
7.	Pembangunan sarana prasarana penunjang Kantor dan Balai Desa	60.000.000	APBD I / APBD II	1 paket	Kedunbanjar
8.	Pembangunan gedung TK	150.000.000	PNPM	5 x 15 M	Ds.Kedungpari
9.	Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan.	125.000.000	APBD/APBN	2.000 x 0,5 M	4 dusun
10.	Pembangunan Gedung Poskesdes.	140.000.000	APBD	9 x 6 M	Mloso
11.	Jitut	100.000.000	APBN	400 M	Kedungpari/Kedungbanjar
12.	Pembangunan Gapura	100.000.000	APBD II	2 Unit	Mloso dan Rambit

13.	Bantuan modal PUAP	100.000.000	APBN	1 paket	Ds. Kedungbanjar
14.	Gedung perpustakaan	150.000.000	APBN	6 x 9 M	Ds. Kedungbanjar
15.	Pembangunan GedungTPQ	115.000.000	APBN	7 x 9 M	Rambit
16.	Pemberian makanan tambahan bagi balita	50.000.000	APBD II	4 paket	Ds. Kedungbanjar
17.	Pembangunan MCK masing-masing dusun.	100.000.000	APBD II	4 Unit	4 Dusun
18.	memberikan kridit lunak bagi bagi UKM.	200.000.000	APBN	1 kelompok	Ds.Kedungbanjar
19.	Pelatihan pembuatan kue dan juga bagi para peternak.	150.000.000	APBN/APBD	2 Kelompok	Ds Kedungbanjar
20.	Bantuan bagi para peternak kambing dan ikan lele	100.000.000	APBN	2 Kelompok	Kedungpari dan Rambit
21.	SPP (Simpam Pinjam Perempuan)	150.000.000	PNPM	3 Kelompok	Ds. Kedungbanjar
22.	Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana olah raga bagi remaja	100.000.000	APBN	1 paket	Ds Kedungbanjar
23.	Pembangunan sarana prasarana kelengkapan peribadatan.	200.000.000	APBN/APBD	4 paket	4 Dusun
22.	Bantuan Hand tractor dan Pompa air	100.000.000	APBN	2 unit	Ds Kedungbanjar

4.2.4. STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mencapai serta merealisasikan program 5 (Lima) besar sebagai sekala prioritas pembangunan di Desa Kedungbanjar selama kurun waktu 5 (lima) tahun maka perlu dukungan semua elemen yang terkait serta perlu kerja keras kita bersama yaitu pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa Kedungbanjar. Adapun faktor kunci sebagai strategi untuk merealisasikan program tersebut adalah :

1. Menciptakan aparatur pemerintah Desa yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur serta peningkatan pelayanan publik.
2. Peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan di Desa Kedungbanjar dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang dilakukan secara konsekuen.
3. Mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
4. Membangun komitmen bersama antara eksekutif (Pemdes) dan Legeslatif (BPD) dalam merealisasikan setiap program yang ada.
5. Melakukan kerja sama yang sinergis antar pemerintah Desa dengan struktur pemerintah di atasnya maupun dengan di Desa-Desa yang lain.
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi tepat guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta memberikan layanan yang prima pada masyarakat.
7. Mengembangkan Usaha Kecil Masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat peDesaan.
8. Menghimpun solidaritas petani Desa Kedungbanjar dalam menyelesaikan permasalahan pertanian, dengan menggandeng pemerintah Desa sebagai mitra tani.

4.2.5. STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

4.2.5.1. ASAS UMUM

APBDes disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan desa, berpedoman pada kerja pemerintah desa dan selaras dengan RPJM-Desa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan secara brutto dalam APBDes. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai.

Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja desa terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Pembiayaan terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

4.2.5.2. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Mengingat pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pusat, Propinsi maupun daerah maka penerimaan desa yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan asli desa (PADes). Tuntutan peningkatan PADes semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada desa. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pungutan maupun pengelolaannya.
- b. Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan desa. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh

menghambat kinerja perekonomian baik di daerah maupun di desa. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, pemerintah desa akan berkordinasi dengan Kecamatan untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping kepada beban ekonomi masyarakat.

- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan desa dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen.
- e. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan swadaya maupun retribusi desa melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas keuangan desa akan menentukan kemampuan penerimaan desa dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah desa dapat diukur dari penerimaan pendapatan desa, penerimaan pendapatan desa dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi PADes terhadap penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PADes dan pendapatan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Upaya untuk peningkatan pendapatan desa diharapkan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan desa dalam struktur APBDes masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan desa masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa Kedungbanjar.

Dibawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Desa Kedungbanjar dari tahun di tahun 2013.

Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kedungbanjar
Tahun 2013

NO	URAIAN	2013
1	2	3
A.	POS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DESA	
1.	Hasil kekayaan Desa	84.600.000
2.	Hasil usaha Desa	-
3.	Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	7.500.000
4.	Hasil Gotong Royong	10.000.000
5.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	2.500.000
6.	Bagi hasil pajak	3.500.000
B	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT dan DAERAH	
	Dana perimbangan Pusat dan Daerah	66.500.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, propinsi dan Kabupaten	97.300.000
C	SUMBANGAN PIHAK ke TIGA	
D	PENDAPATAN LAIN-LAIN	
	Jumlah	321.900.000

Sumber : Nota Keuangan Desa Kedungbanjar

Tabel diatas menunjukkan bahwa proporsi pendapatan desa masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan desa masih rendah. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistimatis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi desa.

Dengan mempertimbangkan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan maka proyeksi penerimaan desa pada tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Proyeksi Penerimaan pendapatan Desa tahun 2013 s/d 2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Proyeksi	321.900.000	702.926.300	750.500.000	800.500.000	950.000.000	970.000.000

4.2.5.3.ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

Belanja desa diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan masyarakat, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah. Dalam penggunaannya, belanja desa harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis desa.

Belanja desa merupakan representasi atau gambaran tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pelayanan masyarakat. Demikian juga arah dan kebijakan umum belanja pembangunan pada dasarnya memuat komponen tugas-tugas pelayanan dan capaian-capaian yang diharapkan melalui alokasi belanja. Untuk itu pemerintah desa Kedungbanjar menetapkan arah kebijakan belanja diorientasikan pada empat bidang yaitu : Bidang sarana Transportasi Jalan, Pertanian, Pendidikan, Permodalan serta penciptaan lapangan kerja. Sehingga dapat dicapai tujuan yaitu :

- a. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
- b. Meningkatnya ketahanan usaha-usaha rakyat
- c. Terpeliharanya kelestarian SDA dan keseimbangan lingkungan hidup.
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatnya kualitas kerukunan kehidupan beragama.
- g. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga.
- h. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman
- i. Meningkatnya kualitas berdemokrasi
- j. Meningkatnya kualitas pemerintah desa yang akuntabel
- k. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam pengelolaan pembelanjaan berpijak pada ketentuan standart harga yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa, berpijak pada prinsip penghematan, didukung tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan intensifikasi pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam APBDes. Sebagaimana diketahui bahwa struktur belanja desa dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, sedangkan belanja administrasi umum, modal, oprasional dan pemeliharaan, bantuan keuangan dan belanja tak terduga merupakan jenis belanja yang menjadi kelompok satuan belanja terkecil.

Dalam penyusunan APBDes, ketersediaan penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis. Karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran balanja desa disusun berorientasi kepada tujuan.

Pengelolaan belanja desa sangat erat kaitannya dengan sistim manajemen keuangan desa, sistim penganggaran maupun sistim akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Publik Accountability) dengan didasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja desa harus berdasarkan anggaran kinerja (Performance Budget) yaitu belanja desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berporentasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja desa harus digunakan sebesar-besarnya kepentingan publik. Identifikasi belanja pengeluaran

akan di bedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek trasparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Keterbatasan sumber penerimaan menimbulkan konsekuensi logis pada belanja desa, hal ini di karenakan kebutuhan tidak proporsional dengan potensi. Sedangkan belanja desa sifatnya tetap yang dulu merupakan belanja rutin, baik belanja gaji maupun non gaji harus dikeluarkan dulu, namun demikian beban belanja tersebut tidak otomatis non gaji harus dipenuhi tanpa adanya kebutuhan riil. Selanjutnya pada belanja desa yang sifatnya tidak tetap terutama untuk pembiayaan program

pembangunan dialokasikan berdasarkan beberapa kriteria terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3

Rekapitulasi Belanja Desa Kedungbanjar tahun 2013

NO	URAIAN	2013
1	2	3
A.	POS BELANJA LANGSUNG	
1.	Belanja Pegawai/Honorarium	8.250.000
2.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000
3.	Belanja Bahan dan Matrial	42.200.000
4.	Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.	Belanja pegawai/penghasilan Kades	142.300.000
2.	Belanja Bantuan sosial	6.950.000
3.	Belanja Bantuan Keuangan	14.200.000
4.	Belanja tidak terduga	100.000.000
	JUMLAH	321.900.000

Sumber : APBDes Kedungbanjar

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 20013 anggaran belanja tidak langsung mendominasi dibanding anggaran belanja langsung. Kiranya dibutuhkan kepekaan sosial dan kebijakan dari pemerintah desa untuk lebih mengedepankan belanja Publik.

Adapun proyeksi Belanja desa Kedungbanjar tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Proyeksi Belanja Desa tahun 2013 s/d 2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pro yeksi	321.900.000	702.926.300	750.500.000	800.500.000	950.000.000	970.000.000

Sumber : Data diolah.

Mencermati besarnya belanja yang harus dikeluarkan pada lima tahun mendatang diperlukan upaya serius untuk mengelola belanja desa sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.

4.2.5.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu, penerimaan pinjaman transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Melihat prediksi lima tahun kedepan, menunjukkan bahwa prosentase kenaikan belanja seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan di Desa. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan pemerintah desa diperlukan langkah-langka pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.

4.2.5.5. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kebijakan di bidang keuangan desa meliputi dua aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan atau pendapatan desa dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan desa.

1. Pendapatan Asli Desa

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih mampu mengendalikan sumber-sumber keuangan. Tuntutan peningkatan PADes semakin

besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah daerah di limpahkan pada desa. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan pendukung pelaksanaan otonomi desa, jumlahnya relatif kurang memadai sehingga desa harus kreatif dalam meningkatkan PADesnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDes. Sumber-sumber penerimaan desa yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja harus didalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

2. Belanja

Arah dan kebijakan umum belanja pembangunan memuat komponen pelayanan publik dan tingkat pencapaian yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan desa, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun kebijakan umum belanja pemerintah desa Kedungbanjar diarahkan pada :

1. Melanjutkan kegiatan sebelumnya.
2. Efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan perluasan kemitraan.
3. Mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.
4. Melaksanakan kegiatan reguler untuk mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, arah kebijakan umum belanja desa Kedungbanjar diprioritaskan pada :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
 - a) Melakukan percepatan pembangunan jalan poros Desa Kedungbanjar -Sidorejo
 - b) Pendayagunaan air baku untuk pemenuhan air irigasi dan kebutuhan air lainnya.
 - c) Percepatan pembangunan jalan Dusun dan lingkungan.

- d) Percepatan untuk pembangunan sarana prasarana peningkatan pelayanan masyarakat.
 - e) Penanganan seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
 - f) Mendorong peran serta aktif masyarakat untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat.
- a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan memenuhi sarana prasarana pendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b) Peningkatan Kualitas kehidupan masyarakat dengan memenuhi angka standar kesehatan nasional
 - c) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - d) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
 - e) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - f) Pencegahan penyakit menular
3. Penanggulangan kemiskinan dan memacu kewirausahaan.
- a) Melanjutkan dan menjalankan program Simpan pinjam yang telah berjalan
 - b) Pengembangan potensi wilayah dan ekonomi pedesaan.
 - c) Meningkatkan peran serta masyarakat maupun, dunia usaha, ormas dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkesinambungan.
 - d) Pengelolaan modal usaha dengan baik dan berkesinambungan
4. Revitaliasi pertanian
- a) Peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - b) Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian serta penguatan lembaga pendukung serta normalisasi irigasi pertanian.

- c) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
- d) Penerapan teknologi pertanian dalam rangka menuju desa swasembada pangan.

5. Pemberdayaan Koperasi

- a) Mengembangkan dan memberdayakan Usaha ekonomi produktif guna memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penaggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Memperluas basis dan kesempatan berusaha menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

3. Pembiayaan

Arah dan kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan umum APBDes. Sebagai bagian dari arah kebijakan umum APBDes maka arah yang diinginkan dan kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja desa.

Arah dan kebijakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah diarahkan pada akurasi, efesiensi, efektifitas dan profitabilitas.
- 2. Apabila APBDes dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer persediaan kas penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3. Apabila APBDes dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

4.2.5.6. PERMASALAH

a. Pendapatan

Upaya menghimpun PADes tersebut sedapat mungkin harus dilakukan tanpa harus menambah beban masyarakat, melainkan melalui upaya

peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan desa.

Beberapa hambatan dalam peningkatan pendapatan desa diantaranya adalah:

1. Masalah Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu misi pemerintah desa, yaitu peningkatan kualitas pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyata adalah percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

2. Masalah Perencanaan Penerimaan Pendapatan Desa

Perencanaan target beberapa jenis pungutan merupakan kewenangan pemerintah desa.

Dengan demikian sistem perencanaan PADes berdasarkan pada prinsip :

- a) Kejelasan penghitungan potensi
- b) Pengaruh pendapatan masyarakat
- c) Pencermatan ketaatan dan penyimpangan terhadap perilaku masyarakat
- d) Situasi KAMTIBNAS.

3. Masalah Dana Perimbangan

Dalam memprediksi penerimaan dana perimbangan sangat tergantung pada otoritas pemerintah pusat dan daerah, sehingga rencana penerimaan tidak diketahui sebelumnya.

b. Belanja

Permasalahan utama belanja desa adalah :

1. Besaran atau alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitas layanan masyarakat yang terus berkembang.
2. Efisiensi yang relatif masih kurang bagus

3. Efektifitas pemanfaatan belanja yang belum baik, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang kurang fokus pada sasaran program.

c. Pembiayaan

Dengan mencermati bahwa pembiayaan itu merupakan transaksi keuangan desa dan belanja desa, maka selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari pada anggaran belanja desa . Sedang defisit anggaran terjadi apabila anggaran belanja lebih besar dari pada pendapatan.

Apabila dalam penyusunan anggaran pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran belanja maka terjadi defisit anggaran, dan mencari sumber dana untuk menutup defisit tersebut, apakah diperoleh dari dana pinjaman, penjualan aset desa yang dipisahkan atau ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN



RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RPJM-Desa yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun kiranya kami sebagai Tim penyusun akan mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Dari sekian permasalahan yang muncul dari usulan masyarakat, Pembangunan Sarana Transportasi masih mendominasi sebagai sekala prioritas program. Walaupun enam bidang yang lain juga masih membutuhkan perhatian dari semua pihak yang berwenang baik pemerintah desa Pemerintah Daerah Tk.II, Pemerintah Daerah Tk.I, maupun Pemerintah Pusat sendiri. Tentunya juga peran aktif dari warga masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program ternyata warga desa Kedungbanjar lebih percaya pada masyarakat yang mengerjakan. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan, pertama apakah memang betul-betul kehendak masyarakat yang menginginkan pola pembangunan dengan prosedur yang ada dan partisipatif atau masyarakat memang kurang percaya terhadap pemerintah desa sehingga enggan untuk mempercayakan pelaksanaan pembangunan. Jika benar demikian adanya, hal ini menjadi kesuksesan pemerintah desa dalam pemberdayaan warga untuk terlibat aktif setiap proses pembangunan yang ada di desa.

Besarnya Tingkat Belanja desa dari pada tingkat Pendapatan di APBDes tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.

Dokumen RPJMDes disusun sebagai upaya agar dalam proses pemerintahan desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan kontrol yang positif dari semua warga.

5.2. SARAN-SARAN

Agar semua program dapat terealisasi maka perlu keseriusan semua pihak untuk mewujudkan semua rencana program yang telah tertuang dalam dokumen RPJMDes.

Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinyu serta berkesinambungan, dan juga lebih mengedepankan faktor Prioritas, efektif, efisien, transparan.

Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah desa harus di sosialisasikan kepada seluruh warga dengan harapan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat.

Karena keterbatasan APBDes untuk membiayai semua program di desa maka hendaknya pemerintah desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondisi seluruh masyarakat.

Setiap hasil pembangunan harus segera di laporkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

5.3 PENUTUP.

Demikian hasil akhir dari penyusunan dokumen RPJMDes yang telah kami susun kurang lebih 2 (dua) bulan, dengan melalui proses serta diskusi yang panjang, semua harapan serta keinginan warga desa Kedungbanjar selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ada didalam dokumen tersebut. Besar harapan kita bersama, apa yang menjadi harapan serta keinginan semua warga desa Kedungbanjar dapat terwujudkan melalui kerja keras dan kesungguhan semua pihak.

Tak lupa kami sebagai tim penyusun RPJMDes, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dokumen ini dan taklupa pula saran serta kritik membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan dokumen RPJMDes tahun–tahun yang akan datang.

Tim Penyusun RPJMDes

PERINTAH DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN

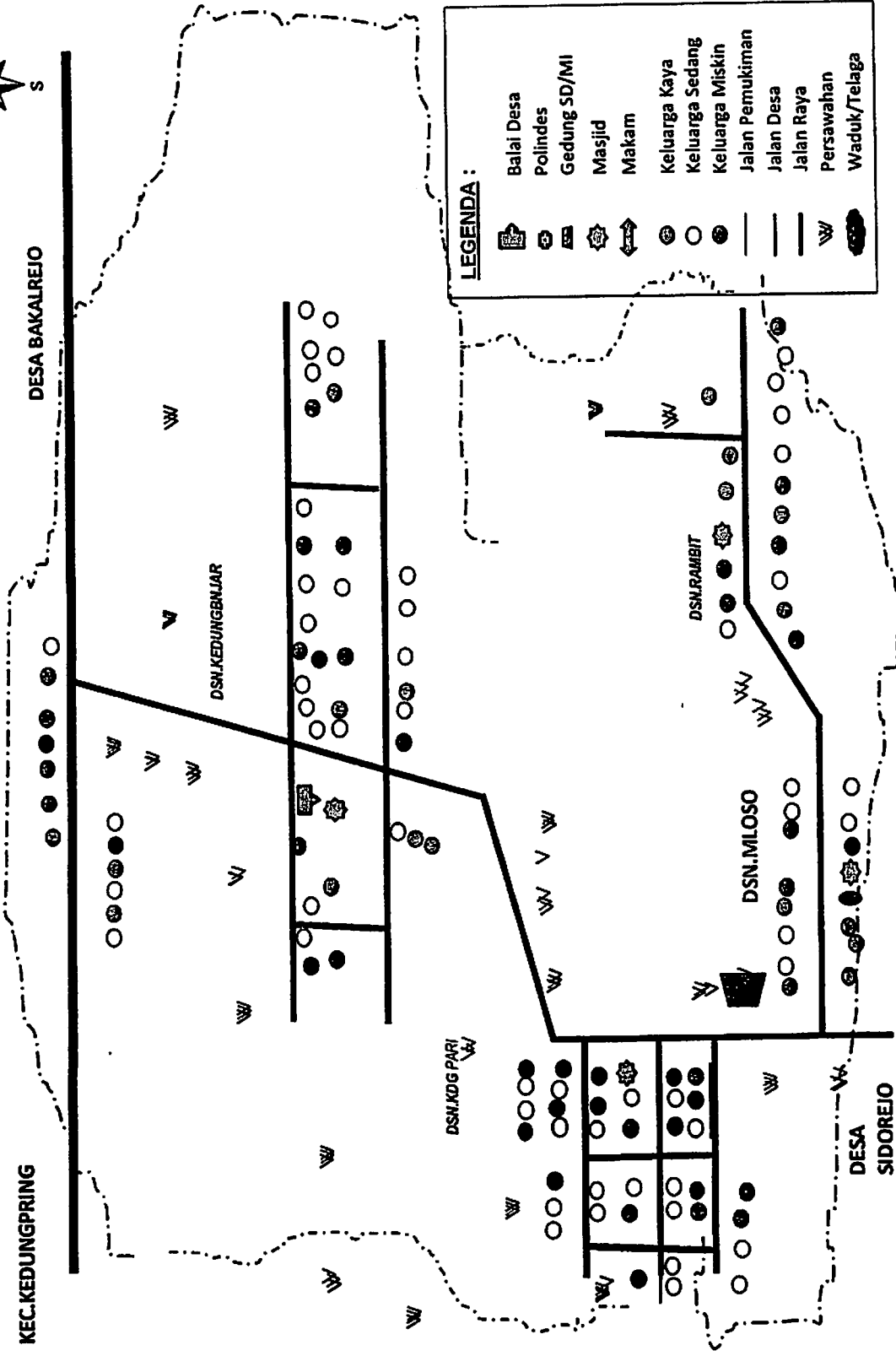


RPJM-Desa DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013 -2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PETA DESA KEDUNGBANJAR



TABEL PENGELOMPOKAN MASALAH DAN POTENSI DESA KEDUNGBANJAR

PENGELOMPOKAN KOORDINATOR BIDANG									
NO	PERMASALAHAN	POTENSI	SARA NA PRASA RANA	KESE HATAN	PENDI DIKAN	PEME RINTA HAN	SOSIAL BUDA YA	LINGKU NGAN HIDUP	EKONO MI
1.	- Masih rendahnya kualitas sarana prasarana transportasi jalan poros Desa Kedungbanjar - Masih banyak jalan lingkungan dusun yang kondisinya masih memprihatinkan - Saluran Drainase yang masih kurang. - Kebutuhan akan air irigasi dan air bersih untuk kebutuhan rumag tangga di musim kemarau - Kwalitas badan jalan yang masih rendah, sehingga perlu pendmping jalan.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ Sumber Daya Manusia	X						
2.	- Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di desa Kedungbanjar - Pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai - Kurangnya dana pendukung untuk peningkatan kesehatan masyarakat. - Kurangnya fasilitas pendukung peningkatan pelayanan kesehatan. - Kurangnya penyuluhan kesehatan	✓ SWADAYA MASYARAKA ✓ BIDAN DESA ✓ KADER KESEHATAN		X					

3.	▪ Masih belum maksimalnya pengelolaan dan manajemen pendidikan di desa Kedungbanjar ▪ Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai, sehingga mengganggu proses belajar mengajar siswa ▪ Kesejahteraan tenaga pendidik yang masih kurang layak. ▪ Banyaknya siswa berprestasi tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ▪ Sarana prasarana pendidikan non formal yang masih kurang memadai.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ KOMITE SEKOLAH ✓ LEMBAGA DAN PENGURUS	X						
4.	▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan administrasi desa. ▪ Kurangnya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dalam peningkatan pelayanan publik ▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kelengkapan Kantor dan Balai Desa.	✓ SWADAYA MASYARAKAT ✓ PERANGKAT DESA	X						
5.	▪ Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosial budaya	✓ POTENSI PARA REMAJA							

	▪ Tidak adanya tenaga pengajar untuk pengembangan bakat dan minat para remaja ▪ Sarana olah raga yang masih kurang memadai ▪ Peningkatan sarana prasarana peribadatan.	✓ SARANA PRASARANA PENGEMBANGAN BAKAT						X		
6.	▪ Masih kurangnya kesadaran warga akan arti penting lingkungan hidup yang sehat dan nyaman ▪ Masih kurangnya saluran drainase ▪ Masih kurangnya tanaman produktif yang bisa menghasilkan nilai ekonomis	✓ SWADAYA MASYARAKAT							X	
7.	▪ Masih rendahnya tingkat perekonomian warga masyarakat desa Kedungbanjar ▪ Masih tingginya angka pengangguran di desa Kedungbanjar ▪ Kekurangan modal bagi para pelaku ekonomi menengah dan kecil ▪ Kekurangan sarana produksi dan modal, bibit dan obat-obatan bagi para petani ▪ Kekurangan modal bagi para peternak	✓ ADANYA POKMAS ✓ SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ✓ Potensi Sumber daya alam ✓ Gapoktan								X

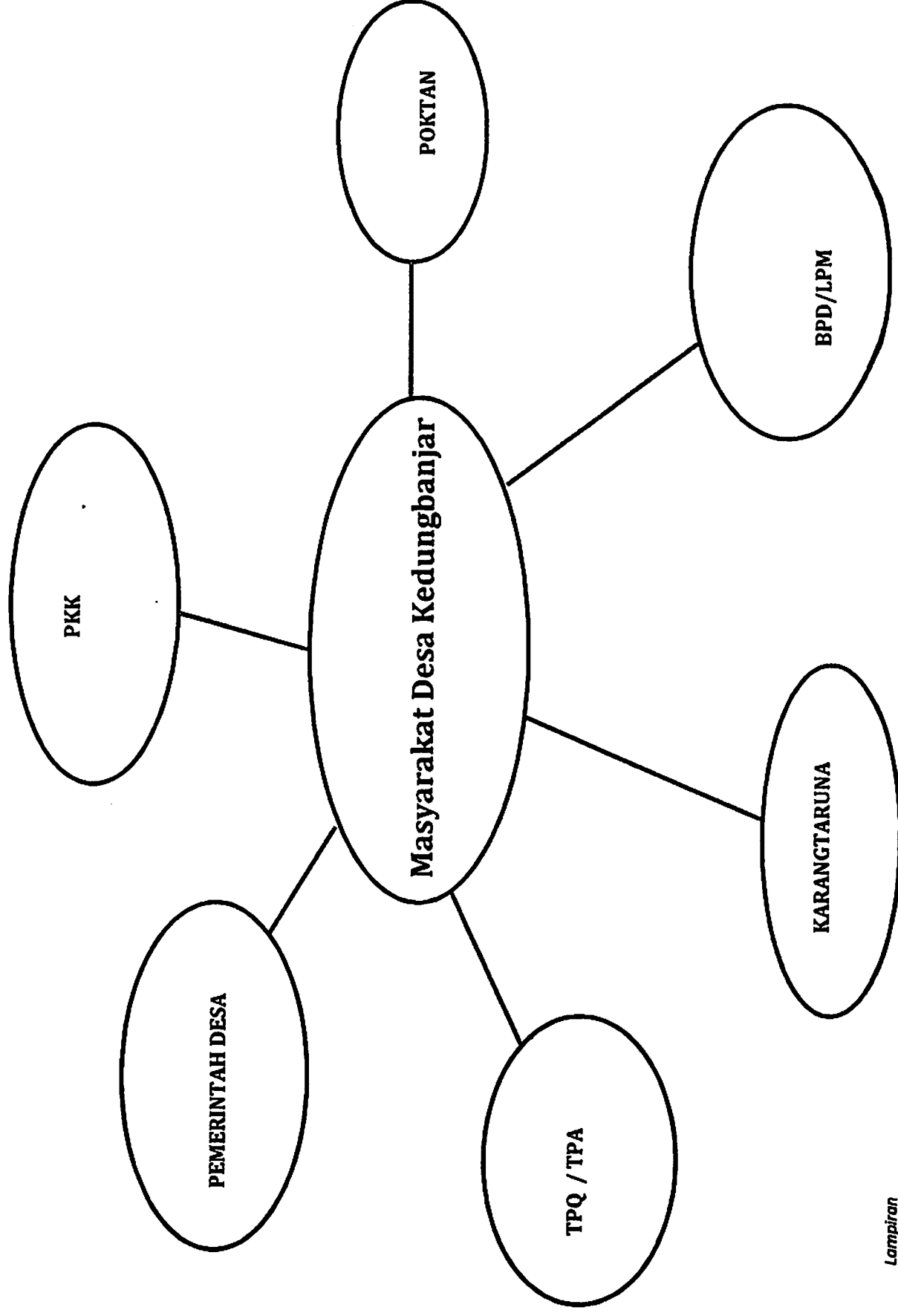
TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA KEDUNGBANJAR

NO	MASALAH	POTENSI
1.	✓ Masih rendahnya kualitas sarana prasarana transportasi di desa Kedungbanjar,khususnya jalan poros desa dan jalan lingkungan, dan jembatan. ✓ Labilnya struktur tanah di Desa Kedungbanjar ✓ Kekurangan air untuk kebutuhan sektor pertanian ✓ Kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga	▪ Swadaya masyarakat ▪ SDM
2	✓ Masih rendahnya kualitas kesehatan warga masyarakat desa Kedungbanjar ✓ Sarana prasarana yang kurang mendukung untuk program peningkatan kesehatan masyarakat.	▪ Bidan desa ▪ Kader posyandu
3.	✓ Masih rendahnya kwalitas sarana prasarana pendidikan desa Kedungbanjar ✓ Banyaknya siswa berprestasi yang tidak mampu meneruskan sekolah karena terbentur masalah ekonomi. ✓ Sarana dan prasarana pendidikan agama yang dirasa masih kurang menunjang dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa Kedungbanjar.	▪ Swadaya masyarakat ▪ Komite sekolah ▪ Pengurus dan anggota
4.	✓ Pelayanan masyarakat oleh perangkat desa yang dirasakan masih kurang maksimal ✓ Sarana pendukung kinerja perangkat dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. ✓ Sarana prasarana untuk kegiatan pemerintahan yang masih belum memadai. ✓ Masih minimnya sarana identitas Desa maupun Dusun	• Perangkat • Swadaya masyarakat
5.	✓ Kurangnya program pengembangan bakat dan potensi sosial budaya ✓ Sarana dan prasarana yang mampu mengakomodir kegiatan sosial budaya warga masyarakat desa Kedungbanjar.	• Bakat dan potensi • Lembaga dan pengurus
6.	✓ Rendahnya kualitas lingkungan hidup ✓ Pemukiman penduduk yang kumuh	▪ Lahan ▪ Swadaya warga masyarakat
7.	✓ Kekurangan modal bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah ✓ Kurangnya modal bagi para petani, khususnya ketika tiba musim tanam. ✓ Kurangnya program bantuan bagi para etani untuk peningkatan produktifitas pertanian	▪ Pemanfaatan kelompok tani ▪ Program SPP ▪ Poktan

TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA KEDUNGBANJAR

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Rendahnya harga jual hasil panen akibat terganggunya arus transportasi dalam menjual hasil panen	- Kelompok tani - Hasil panen
2.	Rendahnya kualitas jalan ketika memasuki bulan penghujan, jalan menjadi becek dan berlubang	- APBDes - Swadaya masyarakat
3.	Kurangnya air bersih untuk irigasi pertanian dan konsumsi rumah tangga utamanya pada musim kemarau	- Sungai
4.	Timbulnya wabah penyakit, khususnya pada bulan –bulan pergantian musim	- Bidan Desa - Kader posyandu
5.	Penurunan pendapatan ekonomi ketika musim paceklik tiba	- SPP - KOPWAN
6.	Kekurangan modal untuk proses produksi pertanian, khususnya awal musim tanam tiba. Kekurangan bibit unggul dan obat-obatan ketika memasuki musim tanam tiba	- Kelompok tani

DIAGRAM VENN DESA KEDUNGBANJAR



TABEL DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA KEDUNGBANJAR

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Tidak adanya kegiatan yang berjalan	Adanya Pengurus
2.	POKTAN	- Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan - Kurangnya bantuan modal	Pengurus
3.	PEMERINTAH DESA	- Kurangnya fasilitas pendukung kerja administrasi - Identitas Desa	Adanya perangkat
4.	KARANG TARUNA	- Kurangnya dana pendukung kegiatan - Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan	- Adanya pengurus - Adanya fasilitas
5.	BPD/LPM	- Belum adanya kantor - Peningkatan kapasitas	Adanya pengurus
6.	TPQ	- Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan pengajaran - Tunjangan para pendidik	Adanya pengurus

TABEL DAFTAR ANALISA PENENTUAN MASALAH

No	Masalah	Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi	Nilai
1.	Pembangunan sarana dan prasarana (jalan paving) untuk jalan poros desa dan lingkungan.	8	8	8	8	8	40
2.	Pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi.	8	9	8	8	7	40
3.	Pembangunan TPT untuk jalan poros Desa dan jalan lingkungan	8	9	8	8	7	40
4.	Pembangunan jalan pertanian	8	8	8	8	8	40
5.	Pembangunan jembatan	8	9	8	7	7	39
6.	Pembangunan sarana prasarana penunjang Kantor dan Balai Desa	7	7	7	8	8	37
7.	Pembangunan sarana dan prasarana gedung pendidikan khususnya gedung TK dan TPQ	8	7	7	8	8	38
8.	Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan.	9	7	7	5	8	36
9.	Pembangunan Gedung Poskesdes.	8	8	5	7	6	34
10.	Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Desa dengan peningkatan kapasitas struktural pemerintahan Desa.	8	8	8	8	7	39

11.	Pengadaan sarana dan fasilitas pendukung dalam kinerja perangkat sarana prasarana dalam kegiatan pelayanan masyarakat	8	7	6	6	8	35
12.	Pembangunan Gapura Masuk Dusun	8	7	6	6	8	35
13.	Gedung perpustakaan	9	8	4	6	7	34
14.	Pemberian makanan tambahan bagi balita dan pembangunan sarana penunjang bagi kesehatan warga.	8	7	7	6	8	36
15.	Pembangunan MCK masing-masing dusun.	8	7	8	7	8	38
16.	Pembentukan lembaga keuangan yang memberikan kredit lunak bagi warga, dan pelatihan bagi UKM.	8	8	5	7	6	34
17.	Peningkatan kapasitas bagi para ibu-ibu yang memiliki ketrampilan baik itu dalam hal pembuatan kue dan juga bagi para peternak.	8	8	8	8	7	39
18.	Bantuan bagi para peternak kambing dan ikan lele	8	7	6	6	8	35
19.	SPP (Simpam Pinjam Perempuan)	8	7	6	6	8	35
20.	Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana olah raga, sehingga dapat menyalurkan bakat .	9	8	4	6	7	34
21.	Pembangunan sarana prasarana kelengkapan peribadatan.	8	7	7	6	8	36
22.	Bantuan Hand tractor , pompa air dan bibit pertanian serta obat-obatan bagi para petani	8	7	8	7	8	38

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

PERIODE TAHUN 2013 SD 2018

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : LAMONGAN

Kecamatan : SUGIO
Desa : Kedungbanjar

No	Urusan	Kode	Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Biaya	Tahun Pelaksanaan
	Urusan Wajib						
1.01	Pendidikan						
	01.1 - Peningkatan pelayanan pendidikan	01.1.1	Pembangunan gedung PAUD/TK	Peningkatan mutu pendidikan	Kedungpari	120.000.000	2013
		01.1.2	Pemb Gedung TPQ	Peningkatan mutu pendidikan	Rambit	120.000.000	2015
		01.1.3	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Peningkatan mutu pendidikan	Ds Kedungbanjar		2014-2015
	01.2 - Peningkatan mutu pendidikan	01.2.1	Pemberiaan beasiswa	Peningkatan mutu SDM	Ds.Kedungbanjar	100.000.000	2013-2017
		01.2.2	Insentif tenaga pengajar	Peningkatan mutu SDM	Ds.Kedungbanjar	70.000.000	2013-2018
1.02	Kesehatan						
	02.1 - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	02.1.1	Pembangunan MCK	Peningkatan mutu kesehatan	4 dusun	100.000.000	2013-2016
		02.1.2	Pembangunan gedung polindes	Peningkatan pelayanan kesehatan	Mloso	125.000.000	2014-2016
		02.1.3	Pemberian makanan tambahan bagi balita	Meningkatkan gizi bagi balita	4 dusun	50.000.000	2013-2017

1.03	Sarana dan Prasarana						
	03.1 - Peningkatan sarana transportasi	03.1.1	Pembangunan jalan paving	Memperlancar arus transportasi	poros desa kedungbanjar -sidorejo dan Kedungbanjar-Karangsambigalih	450.000.000	2014-2016
		03.1.2	Pembangunan jalan Paving Jalan Dusun	Memperlancar arus transportasi	Kedungbanjar	75.000.000	2015
		03.1.3	Pembangunan jalan Paving Dusun	Memperlancar arus transportasi	Mloso	75.000.000	2015
		03.1.4	Pembangunan jalan Paving jalan Dusun	Memperlancar arus transportasi	Rambit	75.000.000	2016
		03.1.5	Pembangunan jalan Paving Dusun	Memperlancar arus transportasi	kedungpari	75.000.000	2016
		03.1.6	Pembangunan jalan Paving jalan antar dusun lingkungan	Memperlancar arus transportasi	4 Dusun	250.000.000	2013-2018
		03.1.7	Pemb.TPT	Memperlancar arus transportasi	Jalan Poros	250.000.000	2014-2018
		03.1.8	Pembangunan Jembatan	Memperlancar arus transportasi	Mloso	75.000.000	2014-2015
	03.2 - Peningkatan sarana irigasi	03.2.1	Pemb.saluran irigasi	Kelancaran saluran irigasi	Desa Kedungbanjar	200.000.000	2014-2016

		03.2.2	Jalan pertanian	Kelancaran transportasi hasil panen	Rambit	60.000.000	2014-2016
1.04	Lingkungan Hidup						
	04.1 - menciptakan lingkungan yang sehat	04.1.1	Tanaman produktif	Tambahan pendapatan	4 dusun	50.000.000	2013-2016
		04.1.2	Pemb.Saluran air/drainase	Menjaga kesehatan lingkungan	4 dusun	75.000.000	2011-2014
1.05	Sosial Budaya						
	05.1 -Peningkatan pelayanan sosial budaya	05.1.1	Pembangunan/rehab sarana ibadah	Memperlancar kegiatan seni dan budaya	4 dusun	200.000.000	2013-2017
		05.1.2	Renofasi sarana olah raga	Peningkatan sarana olah raga	Ds.Kedungbanjar	100.000.000	2015
	05.2 -Peningkatan mutu kegiatan sosbud	05.2.1	Pelatihan seni budaya	Pengembangan bakat dan minat	4 dusun	60.000.000	2012-2014
1.06	Pemerintahan						
	06.1 -Peningkatan pelayanan publik	06.1.1	Pelatihan komputer	Peningkatan SDM perangkat desa	Ds. Kedungbanjar	75.000.000	2014-2016
		06.1.2	Pengadaan komputer	Peningkatan kinerja perangkat	Ds. Kedungbanjar	5.000.000	2014-2016
	06.2 -Infrasruktur Desa	06.2.1	Pembangunan sarana Kantor Balai Desa	Peningkatan pelayanan masyarakat	Ds Kedungbanjar	50.000.000	2014-2018
		06.2.2	Gapura Dusun	Keindahan Lingkungan	Mloso dan Rambit	10.000.000	2015-2017
1.07	Koperasi & Usaha Masyarakat						

	07.1 -Peningkatan modal usaha	07.1.1	SPP	Tambahan modal usaha	4 dusun	200.000.000.	2013-2018
		07.1.2	Pinjaman lunak bagi para petani	Peningkatan produktifitas	4 dusun	200.000.000	2013-2018
		07.1.3	PUAP	Tambahan modal uasaha	Ds Kedungbanjar	100.000.000	2014-2017
		07.1.4	Tambahan modal bagi UKM	Peningkatan produktifitas	4 dusun	200.000.000	2013-2018
	07.2 - Peningkatan Produksi	07.2.1	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Peningkatan produktifitas	Ds Kedungbanjar	50.000.000	2014-2017
		07.2.2	Bantuan hand tractor	Peningkatan produktifitas	Ds Kedungbanjar	50.000.000	2014-2016
		07.2.3	Bantuan pompa air	Peningkatan produktifitas	Ds Kedungbanjar	25.000.000	2014-2017


 KEPALA DESA
 KEDUNGBANJAR
 KECAMATAN SUGIO
 GUNARTO, SE

Kedungbanjar, 24 Juni 2013

Mengetahui


 KETUA LPM
 SAMIRAN, S.Pd

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM-Desa
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Penyusunan RPJM-Desa tahun 2013-2018 di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, maka pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 11 Juni 2013
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungbanjar

Telah diadakan sosialisasi Program Penyusunan Dokumen RPJM-Desa dan rapat pembentukan TIM RPJM-Desa yang dihadiri peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

Materi/topik yang dibahas dalam rapat ini adalah :

1. Sosialisasi Program Penyusunan Dokumen RPJM-Desa Kedungbanjar
2. Pengesahan TIM RPJM-Desa Desa Kedungbanjar
3. Penjelasan Teknik Program Penyusunan Dokumen RPJM-Desa Desa Kedungbanjar

Fasilitator dan narasumber dalam rapat ini adalah :

Pimpinan Rapat	: Suwandoyo	dari	Sekdes
Sekretaris atau Notulis	: Jupri	dari	Perangkat Desa

Nara sumber	: 1. Gunarto, SE	dari Kepala Desa Kedungbanjar
	2. Sujito, S.Pd	dari BPD
	3. Drs. Samiran	dari LPM

Susunan acara

1. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
2. Sambutan oleh Bapak Kepala Desa
3. Paparan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) program RPJM-Des
4. Penetapan TIM Penyusun RPJM-Desa oleh kepala desa
5. Penjelasan tugas TIM penyusun RPJM-Desa
6. Tanya jawab
7. Penutup

Hasil yang dicapai

1. Daftar TIM penyusun RPJM-Desa Desa Kedungbanjar

No.	Nama	Jabatan di Desa	Jabatan di Tim Penyusun
1.	Suwandoyo	Sekdes	KETUA
2.	Sujito, S.Pd	BPD	WAKIL KETUA
3.	Kasdan, S.Pd	TPK	SEKRETARIS
4.	Drs. Samiran	LPM	ANGGOTA
5.	Suwondo	Perangkat	ANGGOTA
6.	Kasiadi	Perangkat	ANGGOTA
7.	Basori	Perangkat	ANGGOTA
8.	Jupri	Perangkat	ANGGOTA
9.	Edi S	Perangkat	ANGGOTA
10.	Kasiati, S.Pd	Tomas Pr	ANGGOTA
11.	Suparmi	Tomas Pr	ANGGOTA

2. Dipahaminya konsep, prinsip, prosedur pengelolaan program dan mekanisme kegiatan program.
3. masyarakat paham akan pentingnya dokumen RPJM-Desa bagi proses perencanaan pembangunan di desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungbanjar, 11 Juni 2013

Pimpinan Rapat



SUWANDOYO

Sekretaris/notulis



JUPRI



Mengetahui,

Kepala Desa Kedungbanjar


GUNARTO, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bagian Pemerintahan SETDA, Kabupaten Lamongan
2. Arsip

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM-Desa
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO

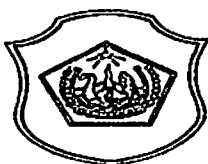
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	Sumudoyo	Ked. Banjar		
3	KASIRDI	KD. BANJAR	PERANGKAT	
4	Sumarto			
5	SAMIKIN	KD. BANJAR		
6	BASORI	KD. BANJAR		
7	JUPRI	KD. BANJAR		
8	Gunardo	KD. BANJAR		
9	USMAN	KD. BANJAR		
10	KARDONO	KD. BANJAR		
11	ROMAH SPd	KD. BANJAR		
12	RODIKIN	KD. BANJAR		
13	RIADI	KD. BANJAR		
14	WABJITO	KD. BANJAR		
15	Al-Kurni	KD. BANJAR		
16	Fdy	KD. BANJAR		
17	URIT	KD. BANJAR		
18	ETENDI	KD. BANJAR		
19	ISWANTO	KD. BANJAR		
20	M. SUBIYANTO	KD. BANJAR		
21	SAMUDAN	KD. BANJAR		
22	Puanto Buh	KD. BANJAR		
23	Naning H.	KD. BANJAR		
24	Sumarto	KD. BANJAR		
25	ISMAIL	KD. BANJAR		

Kedungbanjar, 11 Juni 2013

Mengertahui Kepala Desa

Gunarto, SE





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO DESA KEDUNGBANJAR
Sekretariat : Balai Desa Kedungbanjar, Kec. Sugio – Lamongan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 188/02/kep /413.313.12 /2013

Tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil sosialisasi atau Rapat Desa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana termuat dalam berita acara arapat penyusunan Tim RPJM-Desa, maka Kepala Desa Kedungbanjar menetapkan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2013-2018 dengan susunan :

No.	Nama	Jabatan di Desa	Jabatan di Tim Penyusun
1.	Suwandoyo	Sekdes	KETUA
2.	Sujito,S.Pd	BPD	WAKIL KETUA
3.	Kasdan,S.Pd	TPK	SEKRETARIS
4.	Drs. Samiran	LPM	ANGGOTA
5.	Suwondo	Perangkat	ANGGOTA
6.	Kasiadi	Perangkat	ANGGOTA
7.	Basori	Perangkat	ANGGOTA
8.	Jupri	Perangkat	ANGGOTA
9.	Edi S	Perangkat	ANGGOTA
10.	Kasiati, S.Pd	Tomas Pr	ANGGOTA
11.	Suparmi	Tomas Pr	ANGGOTA

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-desa adalah :

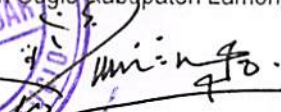
1. Melakukan dan mempersiapkan rapat koordinasi dengan TIM pendamping RPJM-Desa untuk proses perencanaan pelaksanaan program.
2. Membantu serta mendampingi TIM pendamping RPJM-Desa dalam melakukan proses penyusunan dokumen RPJM-Desa.
3. Membantu TIM pendamping untuk melakukan penggalian gagasan pada masyarakat dalam proses penyusunan RPJM-Desa
4. Memberikan informasi serta menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen dengan berkoordinasi pada pemerintahan desa.
5. Membantu serta memfasilitasi pelaksanaan acara sosialisasi RPJM-Desa ditingkat desa.
6. Memberi informasi dan laporan tentang perkembangan pelaksanaan program RPJM-Desa pada pemerintahan desa.
7. Membantu proses legalisasi dokumen RPJM-Desa untuk menjadi Perdes

Surat keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Kedungbanjar, 13 Juni 2013

Mengetahui,
Pemerintahan Desa Kedungbanjar
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan




GUNARTO, SE
Kepala Desa Kedungbanjar

Tembusan ;

1. Camat Sugio
2. Bagian Pemerintah SETDA, Kabupaten Lamongan
3. Tim penyusun RPJM-Desa
4. Arsip

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DRAF AWAL PENYUSUNSN DOKUMEN RPJMDes
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

Berkaitan dengan pelaksanaan program penyusunan RPJM-Desa tahun 2013-2018 Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, maka pada:

Hari: : Jumat, 17 Juni 2013
Pukul : 13.30 – 16.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungbanjar

Telah diadakan Musdes Pembahasan Draft awal RPJMDes Desa Kedungbanjar, adapun Rapat tersebut dihadiri peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

Materi atau Topik yang dibahas dalam rapat ini adalah :

“PEMBAHASAN DRAFT AWAL DOKUMEN RPJM-Desa Desa Kedungbanjar tahun 2013-2018”

Fasilitator dan narasumber dalam rapat ini adalah:

Pimpinan rapat	: Suwandoyo	dari Tim RPJM-Desa
Sekretaris atau Notulis	: Jupri	dari Tim RPJM-Desa

Nara sumber	: 1. Gunarto, SE	dari Kepala Desa Kedungbanjar
	2. Sujito, S.Pd	dari BPD
	3. Drs. Samiran	dari LPM

Susunan acara Musdes ;

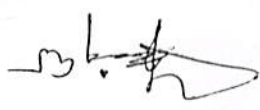
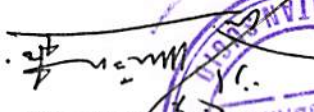
1. Sambutan pembukaan oleh kepala des
2. Pemaparan hasil kerja Tim RPJM-Desa pada masyarakat oleh ketua Tim RPJM-Desa
3. Dialog penggalian usulan masyarakat tentang penyempurnaan draft RPJM-Desa tahun 2013-2018.
4. Tanya jawab
5. Penjelasan RTL kegiatan setelah Musdes
6. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungbanjar, 14 Juni 2013

Sekretaris/notulis

JUPRI

Pimpinan Rapat
SUWANDYO

Mengetahui,
Kepala Desa Kedungbanjar

GUNARTO, SE


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DRAF AWAL PENYUSUNAN
DOKUMEN RPJM-Desa
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	GUNARTO, SE		KADES	1
2	SUWARDYO	Kd Banjar		2
3	KASIADI	KD. BANJAR	PERANGKAT	3
4	GUNARTO.	—	—	4
5	RUDIANTO, ZUN.	RAMBIT	PERANGKAT	5
6	JUPRI			6
7	SAMIKIN			7
8	NANING HIDAYATI			8
9	SUWONDO			9
10	SODIKIN			10
11	EDY DWI S			11
12	BASORI			12
13	SAMIRAN, spd			13
14	SUWARTO, spd			14
15	RAMANI, spd			15
16	RIADI			16
17	KASMI'IN			17
18	WARDI			18
19	Drs ISMA'IL			19
20	TOHA			20
21	MATRAWI			21
22	KARDONO			22
23	KEMAN			23
24	USMAN			24
25	WAKIT.			25

Kedungbanjar, 17 Juni 2013
 Mengetahui Kepala Desa

 GUNARTO, SE

BERITA ACARA
MUSDES PEMBAHASAN DRAF AKHIR DOKUMEN RPJMDes
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN

Berkaitan dengan pelaksanaan program penyusunan RPJM-Desa tahun 2013-2018 Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, maka pada:

Hari: : Jumat, 24 Juni 2013
Pukul : 08.30 – 11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungbanjar

Telah diadakan Musdes Pembahasan Draft akhir RPJMDes Desa Kedungbanjar, adapun Rapat tersebut dihadiri oleh peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir peserta.

Materi atau Topik yang dibahas dalam rapat ini adalah :

"PEMBAHASAN DRAFT AKHIR DOKUMEN RPJM-Desa Desa Kedungbanjar tahun 2013-2018"

Fasilitator dan narasumber dalam rapat ini adalah:

Pimpinan rapat	: Suwandoyo	dari Ketua Tim Perumus RPJM-Desa
Sekretaris atau Notulis	: Jupri	dari Tim RPJM-Desa

Nara sumber	: 1. Gunarto, SE	dari Kepala Desa Kedungbanjar
	2. Sujito, S.Pd	dari BPD
	3. Drs. Samiran	dari LPM

Hasil Musyawarah ;

- ***Draf akhir yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM-Des Desa Kedungbanjar sudah dinyatakan lengkap dan siap untuk diajukan ke rapat BPD yang selanjutnya siap untuk dibuatkan Peraturan Desa.***

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kedungbanjar, 24 Juni 2013

Sekretaris/notulis
JUPRI

Pimpinan Rapat
SUWANDOYO

Mengetahui,
Kepala Desa Kedungbanjar
GUNARTO, SE



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBASAN DRAF AKIR PENYUSUNAN DOKUMEN
RPJM-Desa
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	GUNARTO, SE		KADES	1
2	Suwandoyo	Kd Banjar		2
3	KASIADI	KD. BANJAR	PERANGKAT	3
4	Suwardo	-	-	4
5	RUDIANTO. ZUN.			5
6	JUPRI			6
7	SAMIKIN.			7
8	NANING HIDAYATI			8
9	Suwondo			9
10	SODIKIN.			10
11	EDY DWI S.			11
12	BASORI.			12
13	SAMIRAN, spd.			13
14	SUWARTO, Spd			14
15	RAMANI spd.			15
16	RIADI			16
17	KASMI'IN			17
18	WARDI			18
19	Drs. ISMA'IL			19
20	TOHA.			20
21	MAT RAWI			21
22	KARDONO			22
23	KEMAN.			23
24	USMAN.			24
25	WAKIT			25



Kedungbanjar, 24 Juni 2013

Mengetahui Kepala Desa

Gunarto, SE

BERITA ACARA
RAPAT BPD (PERSETUJUAN DOKUMEN RPJM-Desa)
DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN SUGIO KAB. LAMONGAN

Berkaitan dengan pelaksanaan program penyusunan RPJM-Desa tahun 2013-2018 di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, maka pada :

Hari, tanggal : Senin, 4 Juli 2013
Pukul : 13.30 – 16.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kedungbanjar

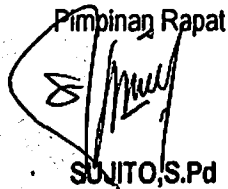
Telah diadakan rapat BPD dengan agenda sebagai berikut :

1. Agenda Rapat
"Pembajupri Draf Dokumen RPJM-Desa Desa Kedungbanjar tahun 2013-2018 untuk dijadikan Peraturan Desa Kedungbanjar"
2. Pimpinan dan Sekretaris/Notulis rapat
 - a. Pimpinan Rapat Bapak SUJITO,S.PD
 - b. Sekretaris Rapat/Notulis Bapak SISWONO,S.Pd
3. Hasil yang dicapai seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar sepakat terhadap Draft Dokumen RPJM-Desa Desa Kedungbanjar tahun 2013-2018 untuk disetujui disahkan menjadi peraturan Desa Kedungbanjar
4. Jumlah Peserta rapat sebagaimana terlampir

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungbanjar, 4 Juli 2013

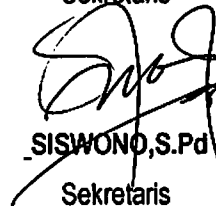
Pimpinan Rapat



SUJITO,S.Pd

Ketua

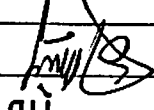
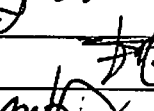
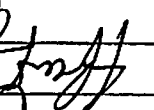
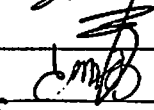
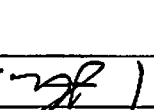
Sekretaris



SISWONO,S.Pd

Sekretaris

Mengetahui,
Ketua Badan permusyawaratan
Desa Kedungbanjar
Sujito, S.Pd

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Sujito, spd	KETUA	
2.	Rusmin, spd	WAKIL KETUA	
3.	Siswono, spd	SEKRETARIS	
4.	DR. NURHADI	ANGGOTA	
5.	WAHYU WIDODO	ANGGOTA	
6.	IBNU AFAN	ANGGOTA	
7.	URIP	ANGGOTA	
8.	EFFENDI. PASULIAN.	ANGGOTA	
9.	MARJITO	ANGGOTA	
10.	M. SUBYONO	ANGGOTA	
11.	LEWANTO	ANGGOTA	

NAMA PENGURUS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR : 03 TAHUN 2013
PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR NO. 02 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
2. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf 1, diperlukan adanya peraturan desa;
3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
4. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/keurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
8. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 31 Juni 2013 Nomor : 414.2/1408/PMD Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi masyarakat di Kabupaten Lamongan.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa.
13. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2006 – 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
16. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/ 02 /kep/413.313.12/2013 Tentang Pembentukan Tim Perumus Dokumen RPJM Desa Kedungbanjar tahun 2013 – 2018.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kedungbanjar tahun 2013-2018.
2. Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ditetapkan di : Desa Kedungbanjar

Pada tanggal : 4 Juli 2013

Badan Permusyawaratan Desa Kedungbanjar

Ketua BPD

SUJITO, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
DESA KEDUNGBANJAR**

**PERATURAN DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA KEDUNGBANJAR TAHUN 2013-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBANJAR**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
2. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf 1, diperlukan adanya peraturan desa;
3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
4. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
8. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 31 Juni 2010 Nomor : 414.2/1408/PMD Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi masyarakat di Kabupaten Lamongan.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa.
13. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2006 – 2010.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
16. Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/02/kep//413.313.12/2013 Tentang Pembentukan Tim RPJM Desa Kedungbanjar tahun 2013 – 2018.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANJAR
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN
DAN
KEPALA DESA KEDUNGBANJAR

M E M U T U S K A N

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM- Desa)
DESA KEDUNGBANJAR
TAHUN 2013-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kedungbanjar dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kedungbanjar,
2. Perentiah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5),

maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan

8. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

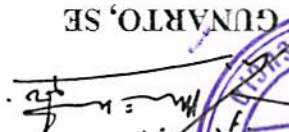
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Pasal 6

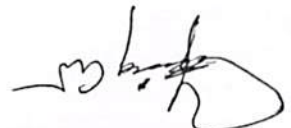
1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / diundangkan.
2. Mengumumkan peraturan desa ini dalam lembaran Desa Kedungbanjar

Ditetapkan di : Desa Kedungbanjar
Pada Tanggal : 04 Juli 2013
Kepala Desa Kedungbanjar

GUNARTO, SE


Kedungbanjar, 04 Juli 2013

Diundangkan di : Desa Kedungbanjar
Pada tanggal : 04 Juli 2013

Sekretaris Desa Kedungbanjar


SUWANDOYO